

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PERAN TNI DALAM MEMBERDAYAKAN WILAYAH PERTAHANAN
GUNA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)**

Oleh:

**MURBIANTO ADHI WIBOWO, S.Sos
KOLONEL INF NRP 11950047081273**

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo Budayo dan

Salam Kebangsaan “Merdeka!”

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah, kekuatan dan kesehatan yang diberikan-Nya, hingga Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV tahun 2022 dapat menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yaitu Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PERAN TNI DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)”**.

Perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan TNI dan TNI-AD atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi peserta Lemhannas RI. Kepada para Pemateri atas ilmu yang diberikan serta kepada Pembimbing/Tutor khususnya Marsda TNI Anang Nurhadi S., S.E., M.M., atas segala bimbingannya, sehingga dapat selesai pada waktunya. Dan tidak lupa juga kepada Bunda Riastika, Ryan, Dimi dan Althaf—isteri dan anak-anak tercinta sebagai salah satu sumber inspirasi dan motivasi; terimakasih atas pengertian dan dukungannya.

Penulis menyadari segala keterbatasan dan kekurangan dalam tulisan ini, oleh karenanya segala koreksi dan masukan untuk perbaikan kualitas tulisan ini sangat diharapkan. Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Kemhan RI, Panglima TNI, Menteri/Kepala LPNK, Kepala Daerah/Instansi Vertikal dan lain sebagainya khususnya dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara yang dikenal juga sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungannya kepada kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai bersama.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, Oktober 2022

Penulis Taskap

Murbianto Adhi Wibowo

Kolonel Inf NRP 11950047081273



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murbianto Adhi Wibowo
Pangkat : Kolonel Inf
Jabatan : Pamen TNI-AD
Instansi : TNI-AD
Alamat : Jl. Angrek H-14, KPAD Cijantung II
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,
Jakarta Timur – DKI Jakarta

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIV Tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Oktober 2022

Penulis Taskap

Murbianto Adhi Wibowo
Kolonel Inf NRP 11950047081273

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
7. Umum	8
8. Tinjauan Peraturan dan Perundang-undangan	8
9. Kerangka Teoritis	12
10. Data dan Fakta	16
11. Lingkungan Strategis	23
BAB III PEMBAHASAN	29
12. Umum	29
13. Peran TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di IKN	29
14. Kendala-kendala Yang Dihadapi TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pembangunan IKN	35
15. Strategi TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Pengamanan IKN	45
BAB IV PENUTUP	60
16. Simpulan	60
17. Rekomendasi	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alur Pikir
2. Kelengkapan Data
3. Riwayat Hidup



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**PERAN TNI DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN
GUNA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)**



Oleh :

MURBIANTO ADHI WIBOWO, S.Sos

NOMOR PESERTA : 068

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIV
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Setiap negara tentu membutuhkan Ibukota Negara karena dipandang memiliki peran strategis di dalam pengelolaan negara, khususnya dalam mencapai tujuan dari terbentuknya negara tersebut. Pentingnya keberadaan Ibukota dipandang sebagai *Center of Gravity* (CoG) tentu merupakan sesuatu hal yang perlu dikelola dengan baik agar mampu memberikan dampak strategis bagi negara tersebut. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan pemindahan Ibukota Negara karena dianggap wilayah sebelumnya tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dibutuhkan negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkup global Rusia, Brazil, dan Jerman merupakan beberapa negara yang dipandang berhasil melakukan pemindahan Ibukota Negara dimana hal tersebut diwujudkan pada berbagai pencapaian kesejahteraan rakyatnya. Begitu pun dalam lingkup regional seperti Malaysia yang juga pernah melakukan pemindahan Ibukota Negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999 dengan pertimbangan selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan tapi kondisinya semakin sulit ditangani.

Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Namun demikian dalam kasus negara Malaysia, pemindahan tersebut dinilai gagal. Salah satunya disebabkan karena pegawai pemerintah Malaysia enggan pindah ke ibu kota negara baru. Meski jarak kedua kota ini tak terlampau jauh, mereka tidak mau pindah karena alasan keluarga. Selain itu, meski Kantor Perdana Menteri sudah dipindahkan ke Putrajaya, namun Pusat perekonomian dan Gedung Parlemen masih berada di Kuala Lumpur. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak semua negara mampu atau berhasil melakukan langkah strategis melalui pemindahan Ibukota Negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia yang menilai keberadaan Ibukota Negara sebagai wilayah vital suatu negara karenanya dijadikan sebagai Pusat Pemerintahan, perekonomian dan segala aktivitas lainnya yang

kesemuanya memiliki tujuan mencapai cita-cita nasional sebagaimana telah diamanatkan di dalam UUD 1945. Ibu Kota Negara yang dinilai sebagai CoG saat ini di Jakarta dipandang memiliki berbagai persoalan seperti penduduk Indonesia 57% terkonsentrasi di Pulau Jawa, kontribusi Pulau Jawa 59% terhadap PDB sehingga berdampak pada ketimpangan pendapatan dengan daerah lain, krisis air, urbanisasi yang tinggi, rawan bencana banjir, gempa bumi, penurunan tanah dan lain sebagainya.¹ Kondisi ini dianggap kurang kondusif dalam mewujudkan tujuan nasional sehingga pemerintah pun mengambil langkah strategis melalui berbagai pengkajian untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur yang disebut sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).²

Pemindahan IKN adalah salah satu rencana pembangunan terbesar Indonesia di era kontemporer. Wacana pemindahan ini pertama kali diutarakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Ia menyatakan bahwa Palangkaraya mampu menjadi IKN dengan alasan geografi yang terletak di tengah Indonesia. Setelah itu pada masa Orde Baru, terdapat wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Selanjutnya pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemindahan IKN didiskusikan atas dasar permasalahan kota Jakarta yang semakin kompleks, seperti kemacetan dan banjir. Keputusan terakhir muncul pada pemerintahan Joko Widodo yang berkomitmen memindahkan IKN dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024³. Setelah terdapatnya RPJMN 2020-2024, Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi salah satu instrumen penguat yang menetapkan bahwa IKN bernama Nusantara akan dibangun di wilayah sekitar Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, dan Balikpapan Timur. Selain itu UU tersebut juga menjelaskan IKN akan memiliki visi sebagai kota dunia yang berkelanjutan, mampu

-
1. Bappenas. 2021. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara.
 2. UU No. 3 tahun 2022 tentang IKN.
 3. Ayundari. 2022. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>. Diakses pada 29 Agustus 2022.

menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang menjadi representasi keberagaman Indonesia⁴.

Dalam memahami pemindahan yang terjadi pada saat ini, terdapat beberapa perspektif yang menjadi pertimbangan perpindahan IKN, Termasuk didalamnya yaitu pertahanan dan keamanan. Pada perspektif pertahanan dan keamanan letak geografis IKN memiliki kelebihan dalam tindakan mobilisasi armada pertahanan dalam melakukan bantuan kepada wilayah daratan maupun kepulauan lain di Indonesia. Dalam memahami posisi IKN yang berada di pulau yang menjadi teritori negara lain, yaitu Malaysia dan Brunei. Tofan, Lukman, dan Dohar menjelaskan bahwa kondisi letak IKN ini berpotensi untuk menghadirkan konflik di garis perbatasan seperti Blok Ambalat. Namun mereka menyimpulkan bahwa secara garis besar, posisi wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi klasifikasi wilayah IKN cenderung aman untuk aktivitas sipil⁵. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana-prasarana pertahanan yang lebih baik, dengan identifikasi berbagai aspek seperti rintangan wilayah bagi musuh, relasi wilayah dan ketersediaan instalasi militer. Perwujudan pembangunan sarana-prasarana tersebut oleh pemerintah nantinya akan mampu mencapai keamanan yang optimal pada wilayah IKN dan sekitarnya⁶.

Pemilihan wilayah tersebut sebagai pengganti Ibukota Negara sebelumnya telah didasarkan pada berbagai pertimbangan diantaranya dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya hingga terkait masalah pertahanan-keamanan. Dalam konteks pertahanan tentu berimbang pada khususnya bagi TNI agar dapat menjalankan perannya di dalam menjaga serta melindungi IKN (Pengamanan Ibukota) dari berbagai dinamika ancaman yang semakin hari kian berkembang. Tujuannya tentu agar pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian dapat terwujud stabilitas nasional yang diharapkan.

-
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
 5. Tofan Hermawan, Lukman Yudo Prakoso, dan Dohar Sianturi. 2020. Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Dampak Dan Upaya Pemerintah Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Jurnal Strategi Pertahanan Laut Vol.6 No.3. 273-296.
 6. Mikhael, Lefri. 2022. Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Tinjauan Geografi Pertahanan. BRIN Pusat Riset Politik. <https://politik.brin.go.id/kolom/pemilu-partai-politik-otonomi-daerah/pemindahan-ibu-kota-negara-dalam-tinjauan-geografi-pertahanan/>. Diakses pada 29 Agustus 2022.

Dalam lingkup pertahanan mengacu UU No. 3 tahun 2002 menjelaskan bahwa TNI sebagai komponen utama dalam menjaga wilayah kedaulatan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 menjelaskan tugas pokok TNI terbagi atas Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana terkait dengan tugasnya selain perang terbagi atas beberapa bagian sehingga memiliki kompleksitas untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perihal tugasnya di dalam OMSP beberapa diantaranya berhubungan dengan mengamankan objek vital, mengamankan Presiden dan Wakil beserta keluarga, dan **memberdayakan wilayah pertahanan**. Regulasi tersebut memberikan pemahaman bahwa TNI pada dasarnya memiliki peran krusial di dalam mewujudkan tujuan nasional.

Terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan secara khusus dijelaskan pada Permenhan No. 40 Tahun 2011 yang mendefinisikan, pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengarah dan pengendalian, serta pemanfaatan semua potensi nasional yang ada di wilayah untuk menjadi sesuatu kekuatan kewilayahan yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan. Regulasi ini memberikan pemahaman pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan bagian dari tanggungjawab TNI sehingga perlu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terlebih di dalam menata IKN menjadi sebuah Ibukota Negara.

TNI dalam hal ini memiliki peran di dalam mengawal dan menjaga wilayah IKN khususnya dari aspek pemberdayaan wilayah pertahanan. Hal ini sejalan dengan Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI yang menjelaskan bahwa TNI memiliki peran strategis di dalam mendukung terwujudnya pembangunan nasional atas berbagai program atau kebijakan yang dilaksanakan khususnya pada pembangunan IKN. Peran TNI sebagaimana diamanatkan UU dituntut mampu menghadapi berbagai ancaman baik militer, non militer maupun hibrida karena secara tidak langsung akan mendukung berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan. Untuk itu keberadaan TNI dalam pembangunan IKN khususnya di dalam pemberdayaan wilayah pertahanan perlu dimaksimalkan agar mampu mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Untuk pembangunan saat ini yang didasarkan pada RPJP tahun 2005-2025, yaitu pembangunan diarahkan untuk dapat mensejahterahkan seluruh masyarakat pada tiap-tiap daerah sehingga dapat menekan kesenjangan yang terjadi terutama wilayah luar pulau Jawa.⁷ Lebih lanjut dalam Permen PPN/Bappenas No. 11 tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024 dimana pada salah satu sasaran strategis yang hendak dicapai yaitu terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.⁸ Hal ini memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya keberlanjutan pembangunan merupakan hal yang perlu dilakukan dengan baik dan komprehensif sehingga memiliki dampak strategis pada kemajuan bersama.

Namun demikian dalam upaya menjaga keamanan IKN dari berbagai ancaman yang ada TNI masih menyisakan berbagai persoalan, diantaranya: 1) Keterbatasan dari segi kuantitas SDM dan kemampuan mendukung pembangunan IKN; 2) Belum terbangunnya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan TNI dalam mendukung pembangunan IKN; dan 3) Belum terbangunnya sinergi dalam upaya TNI melalui pemberdayaan wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan IKN.

Dari persoalan-persoalan tersebut, penulis memandang perlu untuk menelaahnya dalam judul **“Peran TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)”**. Hal ini menjadi penting karena pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang perlu dibangun dengan sebaik-baiknya termasuk dengan melibatkan TNI yang didasarkan pada tupoksinya khususnya berkenaan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan sehingga dengan demikian mampu mendukung tercapainya tujuan nasional.

2. Rumusan Masalah.

Mengacu pada uraian diatas, maka rumusan masalah Taskap ini adalah **“Bagaimana peran TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan guna**

7. RPJP Kementerian PPN/Bappenas. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025. Halaman 34.
8. Lihat penjelasan Permen PPN/Bappenas No. 11 tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024.

keberlanjutan pembangunan IKN?” yang kemudian diuraikan kedalam tiga pertanyaan kajian, yaitu:

- a. Apa peran TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di IKN?
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan IKN?
- c. Bagaimana strategi TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna pengamanan IKN?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Secara garis besar penulisan Taskap ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan perihal peran TNI dalam membangun pertahanan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan guna keberlanjutan pembangunan IKN.
- b. **Tujuan.** Taskap ini bertujuan untuk dijadikan sumbangan pemikiran penulis secara konseptual dan strategis yang berupa masukan kepada para pemangku kebijakan terkait peran TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Penulisan Taskap ini difokuskan pada peran TNI dalam memberdayakan wilayah pertahanan (Wilhan) di Wilhan IKN guna keberlanjutan pembangunan IKN. Dengan pembatasan penulisan mencakup peran TNI sebagai komponen utama dalam menjaga dan melindungi IKN dari berbagai ancaman melalui pemberdayaan wilayah pertahanan.
- b. **Sistematika.** Penulisan naskah ini mengacu pada ketentuan Juknis Taskap Lemhannas tahun 2022 yang dituangkan kedalam sistematika penulisan sebagai berikut:
 - 1) **Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dikemukakan berbagai gambaran permasalahan yang meliputi pentingnya keberadaan IKN dan keberadaan TNI dengan tupoksinya khususnya terkait pemberdayaan wilayah pertahanan. Selanjutnya uraian singkat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi TNI dalam

pemberdayaan wilayah pertahanan di IKN. Bab ini juga menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian yang berkaitan dengan konteks penelitian ini.

- 2) **Bab II Tinjauan Pustaka.** Bab ini memuat dasar-dasar pemikiran penulis, yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Taskap, yaitu: Peraturan Perundang-undangan, kerangka teoritis, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan analisis tulisan ini.
- 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang meliputi pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan TNI saat ini, postur TNI di dalam pembangunan IKN dan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan TNI dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN.
- 4) **Bab VI Penutup.** Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi penulis terhadap kebijakan strategis mengenai variabel-variabel pembahasan.

5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif. Pengumpulan dan analisis penyajian data dan fakta dalam metode didasarkan pada pengalaman empiris penulis, penelitian literatur (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan adalah perspektif ketahanan nasional, dengan mengkaji teori, konsep, dan landasan hukum/regulasi yang relevan dengan variabel penelitian ini.

6. Pengertian.

- a. **Peran** merupakan aspek dinamis dari kedudukan pada suatu masyarakat.⁹

9. Soejono Soekanto. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo.

- b. **Peran TNI.** TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.¹⁰
- c. **Ketahanan Nasional** merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi dengan orientasi mencapai tujuan nasional yang mampu mengatasi berbagai AGHT yang ada.¹¹
- d. **Indeks Ketahanan Nasional Indonesia (IKNI)** merupakan sistem pengukuran atas gatra yang dirinci menjadi variabel terkecil sehingga dihasilkan suatu parameter yang terukur atas ketahanan nasional.¹²
- e. **Program Pembangunan Nasional (PROGBANGNAS)** merupakan rancangan kegiatan nasional untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan.¹³
- f. **Pemberdayaan wilayah pertahanan** suatu kekuatan kewilayahan yang memiliki ketangguhan dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara.¹⁴
- g. **Ancaman** merupakan segala upaya yang dapat membahayakan keutuhan suatu negara baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri sehingga perlu diantisipasi dengan baik.¹⁵



10. UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 5.

7. Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

8. R.E. Fisher, et. al, Constructing a Resilience Index for the Enhanced Critical Infrastructure Protection Program, Argonne national Laboratory, AN/DIS-10-9, Agustus 2010.

9. PP No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

10. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

11. UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan regulasi atau aturan, kerangka teoritis, serta pustaka lainnya yang digunakan berkaitan dengan Peran TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Keberlanjutan Pembangunan IKN. Hal ini perlu dijelaskan secara baik agar terbangun pemahaman atas materi yang dibahas sehingga dapat membantu proses penyusunan pada bab berikutnya. Sebagaimana pada bagian teori dan konsep yang relevan dengan pokok bahasan digunakan untuk menjawab beberapa persoalan, sedangkan tinjauan peraturan dan perundang-undangan digunakan sebagai landasan hukum untuk memahami kebijakan yang ada, dan tinjauan pustaka sebagai data empiris yang menjadi dalam penulisan Taskap.

8. Tinjauan Peraturan dan Perundang-undangan.

a. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Salah satu poin penting dalam UU ini dalam pasal 4 yang menjelaskan pertahanan negara memiliki tujuan dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Konsep pertahanan negara tersebut perlu diwujudkan melalui melibatkan seluruh komponen pertahanan, termasuk komponen utama, cadangan dan pendukung yang disebut dengan sistem pertahanan semesta. Esensi dari konsep pertahanan tersebut menempatkan TNI sebagai elemen utama yang bertanggung jawab dibantu dengan elemen negara lainnya memberikan jaminan keselamatan negara dari segala bentuk ancaman di bidang pertahanan.¹⁶ Dalam konteks tersebut UU ini digunakan sebagai dasar melibatkan unsur-unsur terkait untuk membangun sistem

11. Pemerintah RI, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

pertahanan yang mampu melindungi dari berbagai ancaman dan gangguan yang kian berkembang. Menghadapi kondisi tersebut TNI memiliki andil besar melalui perannya memberdayakan wilayah pertahanan khususnya dalam pembangunan IKN keberlanjutan.

b. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pada pasal 7 ayat (1) dari UU ini menyatakan TNI memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945, dan melindungi segenap bangsa dan negara dari ancaman dan gangguan. TNI melaksanakan tugasnya melalui Operasi Militer Perang (OMP) dan OMSP. Dalam lingkup OMSP dijelaskan bahwa TNI mengemban tugas yang cukup kompleks yakni dalam pemberdayaan wilayah pertahanan. Untuk itu pada konteks ini pemberdayaan wilayah pertahanan difokuskan dalam mendukung keberlanjutan IKN. Keterlibatan TNI dipandang penting dipahami dengan baik agar mampu mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan sebagaimana dijelaskan pada pembangunan IKN.

c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

IKN pada dasarnya merupakan salah satu wilayah strategis karena daerahnya dijadikan ibu kota negara sebagaimana diatur UU terkait. Sebagai sebuah ibu kota negara tentu akan banyak berbagai aktivitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan di wilayah tersebut sehingga perlu dipersiapkan secara baik. Hal ini dijelaskan pada pasal 2 bahwa IKN bertujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; motor penggerak ekonomi nasional; dan simbol representasi atas keberagaman yang ada di Indonesia di dasarkan pada ideologi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak salah satunya yaitu unsur TNI dengan menjalankan perannya melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Dengan dioptimalkan perannya tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

d. **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.**

Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya nasional bertujuan untuk mentransformasi SDM, SDA dan buatan serta sarana dan prasarana nasional yang merupakan kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan nasional. Lebih lanjut dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa pengelolaan dapat dilakukan melalui penataan komponen pendukung, komponen cadangan dan komponen utama, serta mobilisasi dan demobilisasi. Regulasi ini menegaskan perlunya pengelolaan sumber daya nasional secara baik dengan memaksimalkan keterlibatan seluruh komponen negara khususnya dalam pembangunan IKN berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut posisi TNI mengemban tugas penting dalam mewujudkannya dengan memaksimalkan segala kekuatan yang dimiliki.

e. **Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.**

Regulasi ini secara khusus menjelaskan perihal kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan yang pada hakikatnya memiliki peran penting dalam mewujudkan Sishanta yakni mempersiapkan rakyat sedini mungkin sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Tanpa adanya pemberdayaan pertahanan sangat tidak memungkinkan akan adanya keterlibatan rakyat untuk mendukung upaya pertahanan negara yang dilakukan komponen utama, yakni TNI. Secara umum yang pemberdayaan wilhan mencakup: membantu pemerintah dalam mengoptimalkan segala potensi yang ada untuk kepentingan bersama, membantu pemerintah dalam latihan dasar kemiliteran serta mempersiapkan masyarakat sebagai kekuatan pendukung menghadapi dinamika ancaman yang berkembang.

f. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024.

Kebijakan ini menjelaskan upaya meningkatkan kemampuan pertahanan rentang waktu 2020-2024 diantaranya: implementasi sistem pertahanan pada semua matra termasuk dengan merealisasikan komcad dan komduk, membangun postur pertahanan yang sesuai dalam melindungi kepentingan nasional, pengembangan industri pertahanan, peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan lain sebagainya. Kesemuanya pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni mendukung tercapainya pembangunan nasional.

9. Kerangka Teoritis.

a. Tinjauan teori-teori

1) Teori Evolusi.

Evolusi merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam kurun waktu tertentu hingga terwujudnya sesuatu yang diharapkan¹⁷. Definisi ini memberikan pemahaman dalam konteks kehidupan masyarakat dimana manusia pada dasarnya tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik sebagai bentuk penyesuaian atas perubahan yang terjadi. Pada konteks ini teori evolusi dalam pembangunan IKN merupakan sebuah proses yang perlu dilakukan dengan berbagai langkah yang dipandang relevan dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan yakni terbangunnya tatanan kehidupan yang lebih baik.

2) Teori Perencanaan.

Perencanaan (*planning*) merupakan usaha sadar, tersusun dan berkelanjutan dalam memilih pilihan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Hal ini memberikan pemahaman bahwa

13. Herbert Spenser. 1899. *The Principles of Sociology*. New York: Appleton & Company.

14. Nursini. 2010. Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Teori Dan Aplikasi, diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>

perencanaan diartikan sebagai sebuah upaya terukur yang dilakukan dimana hal tersebut berkeaitan dengan hal-hal terkait yang perlu diperhatikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam perencanaan terdapat konsep dasar yang perlu dipahami yakni terkait dengan proses, penggunaan sumber daya, visi bersama, memilih dan berorientasi ke masa depan. Dalam konteks ini teori perencanaan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pola rancangan pemberdayaan wilayah pertahanan dalam mendukung pembangunan IKN.

3) Teori Pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya memiliki makna yang dinamis, untuk itu dibutuhkan pemahaman yang komprehensif agar istilah pembangunan tidak diartikan secara parsial. Adapun teori pembangunan yang digunakan dalam hal ini yaitu pembangunan dunia ketiga, dimana teori ini berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang ada pada negara-negara di dunia khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, IPTEK dan pertahanan negara-negara maju. Terkait dengan hal tersebut maka teori modernisasi merupakan teori yang menekankan bahwa faktor manusia dan nilai-nilai budaya sebagai persoalan dalam pembangunan.¹⁹ Lebih lanjut teori modernisasi memandang bahwa negara-negara miskin ataupun berkembang membutuhkan bantuan dari negara-negara maju untuk mempercepat pembangunan seperti keuangan, pendidikan dan teknologi. Jika berkaca pada konteks Indonesia dimana memiliki kekayaan alam namun belum mampu dimanfaatkan maka dapat diketahui bahwa Indonesia belum mampu keluar dari persoalan internal bangsa. Berdasarkan hal tersebut, maka teori pembangunan menjadi penting diperlukan terlebih dalam pembangunan IKN agar mampu terwujud

15. Arief Budiman. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

pemerataan dan pada akhirnya mendukung tercapainya ketahanan nasional.

b. Tinjauan Konsep.

1) Konsep Sistem Pertahanan Semesta.

Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), merupakan pertahanan yang mengusung dan menitikberatkan pada keterlibatan berbagai komponen negara untuk berpartisipasi di dalam membangun sebuah sistem pertahanan yang kuat sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas. Sebagai negara yang majemuk dan memiliki karakteristik yang kompleks tentu sistem ini dipandang memiliki peran strategis untuk dapat diimplementasikan agar mampu dinamika ancaman yang semakin berkembang.²⁰ Adapun pada konsep pertahanan semesta dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan keterlibatan semua pihak termasuk TNI dalam sebagai komponen utama pertahanan dalam mendukung pembangunan IKN yang berkelanjutan.

2) Konsep Ketahanan Nasional.

Secara umum istilah Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik bangsa yang berisi ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka mengatasi dan menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT), baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.²¹ Sebagai sebuah sistem, ketahanan nasional Indonesia mempunyai beragam karakteristik gatra yang saling terkoneksi dan berinteraksi satu sama lain. Sesuai dengan bentuk dari NKRI, setiap wilayah memiliki kandungan aspek trigatra, yaitu: geografi,

16. *Ibid.*

17. *Loc., Cit., Lemhanas RI.*

demografi, dan sumber kekayaan alam sebagai gatra statis. Terdapat pula Pancagatra yang menjadi pilar ketahanan nasional RI yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Setiap gatra tersebut akan bersifat dinamis dan memiliki tingkat ketahanan yang berbeda-beda tergantung dari pembinaannya. Dimana dalam setiap ketangguhan gatra tersebut akan mendukung perwujudan tujuan negara dan cita-cita nasional.²²

3) Konsep Sistem Manajemen Nasional.

Sistem manajemen nasional (Sismennas) merupakan upaya mewujudkan tujuan nasional melalui paduan tata nilai, struktur, proses, dan fungsi yang merupakan himpunan usaha dalam rangka mencapai aspek ekonomis (kehematan), efisien (daya guna), dan efektif (hasil guna) sebesar mungkin dengan cara memanfaatkan segala sumber daya dan dana nasional.²³ Keseluruhan proses tersebut perlu melibatkan pengambilan keputusan dan kewenangan.

4) Konsep OMSP.

Military operations other than war (MOOTW) atau OMSP dilakukan diterapkan untuk melengkapi kombinasi yang lain instrumen kekuatan nasional.²⁴ Dalam perkembangannya MOOTW dan perang mungkin sering tampak serupa dalam aksi, MOOTW fokus pada pencegahan perang dan mempromosikan perdamaian sementara perang meliputi skala besar, operasi tempur berkelanjutan untuk mencapai tujuan nasional atau untuk melindungi kepentingan nasional termasuk dalam konteks pembangunan IKN berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini OMSP perlu dipahami secara baik khususnya dalam menerapkan

18. *Ibid.*

19. Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.

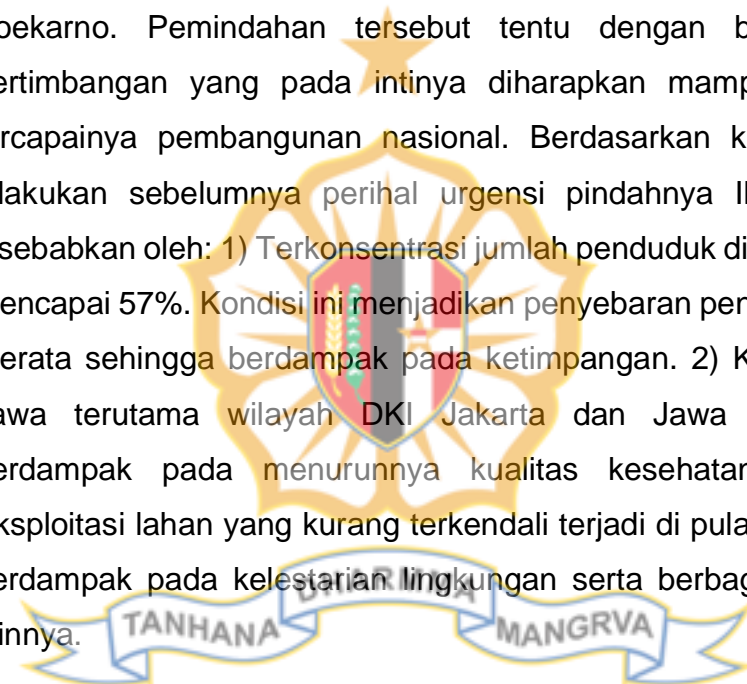
20. Departement of The Army United States of America. *Joint Doctrine for Military Operations Other Than War*, Joint Pub 3-07, June 1995.

pemberdayaan wilayah pertahanan yang dijalankan TNI sebagai komponen utama pertahanan. Dengan demikian diharapkan mampu mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan IKN berkelanjutan sebagaimana yang saat ini sedang berlangsung.

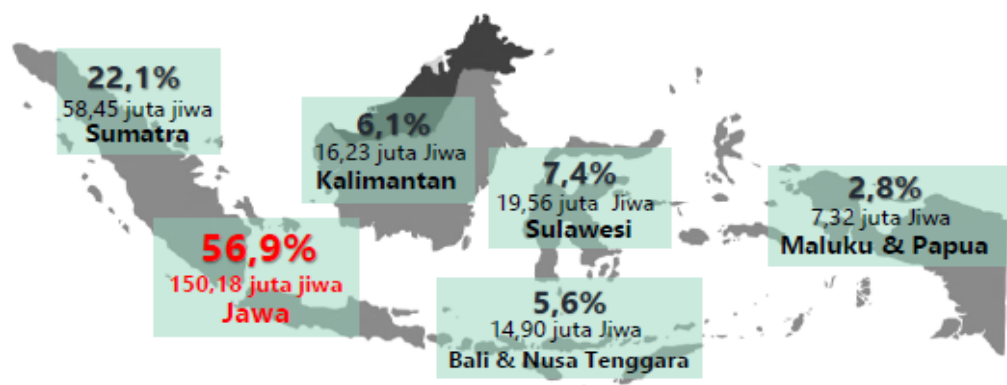
10. Data dan Fakta.

a. Urgensi IKN.

Pemindahan ibu kota di Indonesia dalam perjalanannya telah direncanakan sejak lama yakni pada kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno. Pemindahan tersebut tentu dengan berbagai macam pertimbangan yang pada intinya diharapkan mampu mempercepat tercapainya pembangunan nasional. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan sebelumnya perihal urgensi pindahnya Ibu Kota Negara disebabkan oleh: 1) Terkonsentrasi jumlah penduduk di pulau Jawa yang mencapai 57%. Kondisi ini menjadikan penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada ketimpangan. 2) Krisis air di Pulau Jawa terutama wilayah DKI Jakarta dan Jawa Timur sehingga berdampak pada menurunnya kualitas kesehatan penduduk. 3) Eksploitasi lahan yang kurang terkendali terjadi di pulau Jawa sehingga berdampak pada kelestarian lingkungan serta berbagai pertimbangan lainnya.

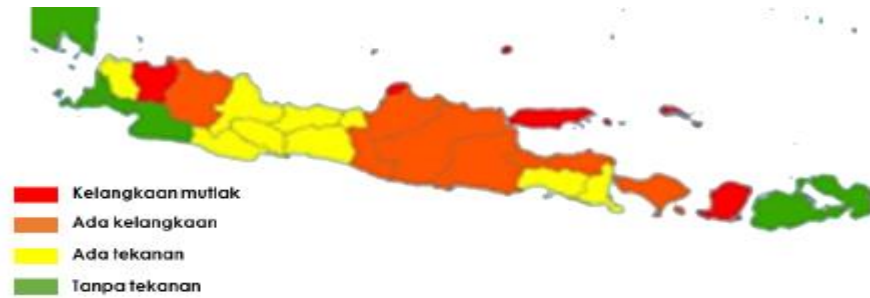


Gambar 2.1: Kondisi Penduduk di Indonesia



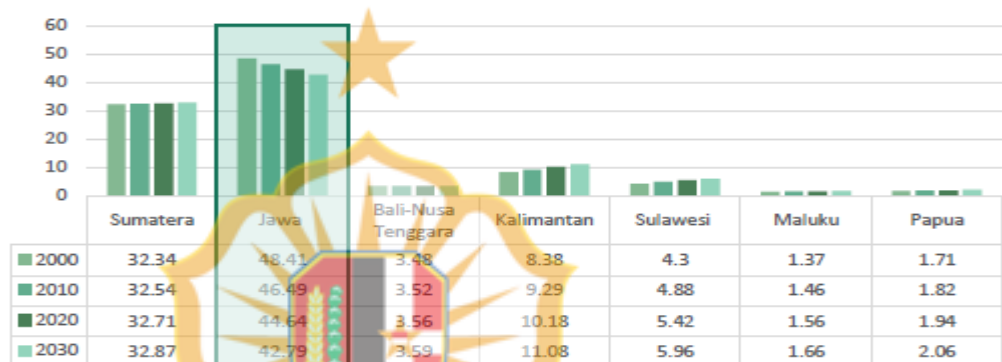
Sumber: Bappenas (2019)

Gambar 2.2: Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa



Sumber: Bappenas (2019)

Gambar 2.3: Konversi Lahan di Pulau Jawa



Sumber: Bappenas (2019)

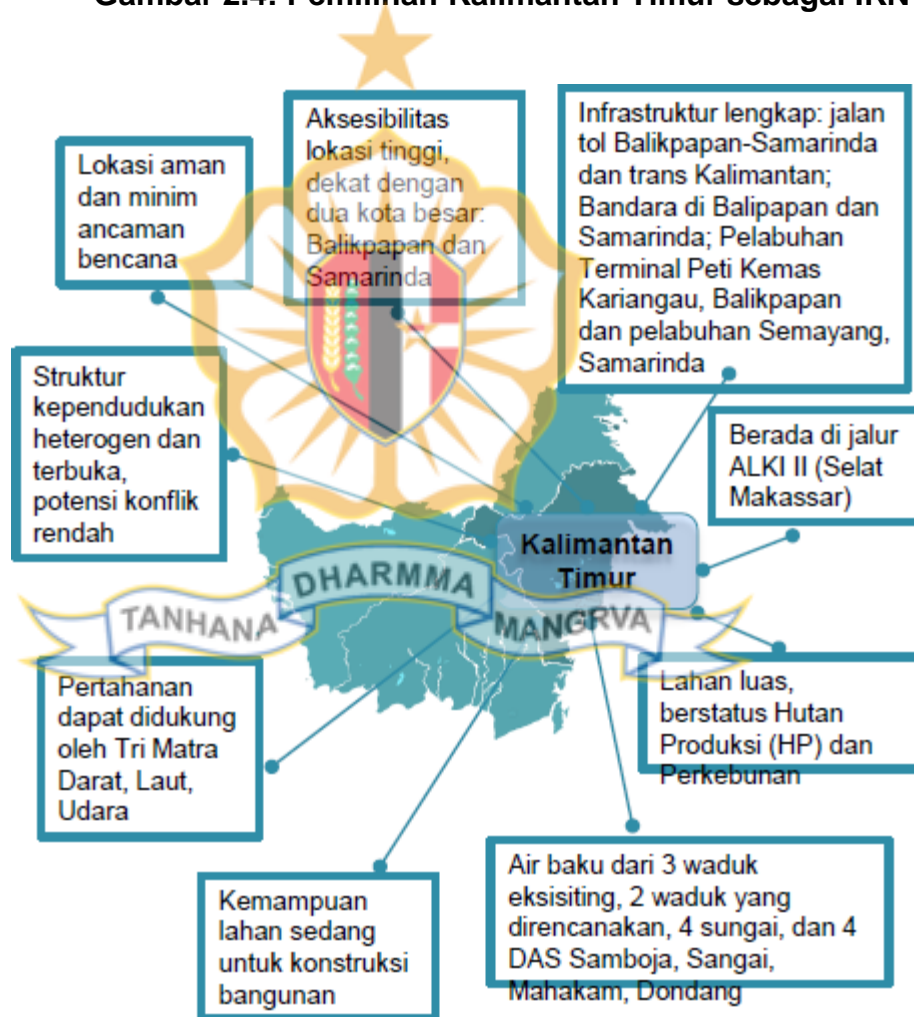
Berdasarkan hal di atas dapat diketahui pembangunan IKN Nusantara tidak hanya ditujukan untuk menjawab tantangan nasional, tetapi juga global. Pembangunan IKN diharapkan mendorong pemerataan akses serta pertumbuhan. IKN memiliki visi menjadi kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep *smart*, *green*, serta *hub* bagi perekonomian nasional dan regional. Guna mewujudkan visi tersebut dibutuhkan kapasitas pertahanan mumpuni untuk melindungi IKN sebagai obyek vital nasional. Adapun beberapa pertimbangan lain yang dijadikan rujukan dalam pemindahan ibukota negara yakni didasarkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Kalimantan Timur dianggap lebih aman dari ancaman bencana sehingga stabilitas dapat lebih terjaga.
- 2) Kondisi penduduk yang dinilai lebih terbuka sehingga terjadinya konflik dapat diminimalisir.

- 3) Memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu jalur perdagangan yang sering kali digunakan.
- 4) Ketersediaan air serta lain sebagainya yang cukup baik dibandingkan Pulau Jawa.
- 5) Luasnya wilayah yang dapat menjadi nilai plus untuk dapat dikembangkan lebih lanjut.

Mengacu pada penjelasan tersebut, maka pemindahan ibukota negara dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4: Pemilihan Kalimantan Timur sebagai IKN



Sumber: Bappenas (2022)

b. Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.

Secara umum pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan oleh TNI di semua tingkat organisasi dan strata kewilayahan TNI. Khususnya TNI AD, TNI AL dan TNI AU, fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan harus diperankan oleh tiap-tiap Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang tersebar di seluruh Nusantara. Kondisi tersebut menuntut Satkowil TNI, mulai dari Kodam/Koarmada/Koopsau, Korem/Lanal/Lanud, Kodim, hingga Koramil/Posal/Posau perlu untuk menjalin komunikasi yang baik dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti K/L, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan instansi-instansi terkait lainnya. Secara umum, pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan bagian dari tugas atau diselenggarakan oleh TNI AD, TNI AL dan TNI AU dalam kapasitasnya selaku Komando Utama Operasional (Kotamaops) TNI.

Sebagai Kotamaops TNI, pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan TNI AD, TNI AL dan TNI AU mengacu pada kebijakan Panglima TNI sebagaimana yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan, dengan fokus utama menyiapkan wilayah pertahanan dalam kerangka OMP. Sementara terkait OMSP juga merupakan tugas pokok, namun dalam konteks ini lebih berkaitan dengan upaya pembinaan teritorial. Secara garis besar dapat disimpulkan pembinaan teritorial merupakan salah satu upaya pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

TNI melakukan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan masyarakat (sebagai kekuatan cadangan dan pendukung) untuk meminimalisir dan mengatasi ancaman tersebut sesuai dengan kebutuhan elemen sipil yang diperlukan. Tujuan utama pembinaan teritorial tidak hanya pada penyiapan dukungan terhadap komponen utama (TNI) dalam menghadapi ancaman militer/tradisional, namun juga dalam rangka mengatasi ancaman non-militer yang bersifat multidimensional dan cenderung memerlukan pelibatan unsur sipil.

c. Kekuatan Militer Wilayah Kalimantan saat ini

Kekuatan militer memiliki peran krusial sebagai satuan pengamanan perbatasan yang telah ada khususnya pada konteks ini di wilayah Kalimantan yaitu Kodam VI/Mulawarman yang bermarkas di Balikpapan Kalimantan Timur dan Kodam XII/Tanjungpura yang bermarkas di Pontianak Kalimantan Barat. Kekuatan Kodam tersebut secara objektif dapat diukur dengan pendekatan jumlah satuan pelaksana wilayah, satuan tempur dan bantuan tempur. Jika dinilai dari segi kuantitas dan kualitas alutsista dan dihadapkan pada luasnya wilayah penguasaan belum dapat memberikan jaminan keamanan terkait pertahanan Negara guna mengantisipasi ancaman dari Negara luar. Adapun perbandingan kekuatan militer antara kedua Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1: Kekuatan TDM

1.	Komando Wil. Timur	4.	1 Yonkav
2.	2 Divisi	5.	1 Yonarmed astros
3.	3 Brigade	6.	1 Rai Armed
	- 8 Yonif	7.	1 Ki Zeni
	- 1 Yon Zeni	8.	3 Ki Hub
	- 1 Yon Benglap	9.	3 Ki Pom
	- 2 Yon Hub	10.	3 Ki Bek
	- 1 Yon Kes	11.	2 Ki Ang
	- 2 Ki Pal	12.	1 Ki Angud + Angrat
		13.	4 Resimen AW

Sumber: MABES TNI (2021)

Tabel 2.2: Gelar kekuatan TNI AD di wilayah Kalimantan

KODAM XII/TPR		KODAM VI/MLW	
1	Kodam	1	Kodam
2	Korem Type A	3	Korem Type A
1	Kodim BS	1	Kodim BS
12	Kodim	23	Kodim
1	Brigif	1	Brigif
2	Yonif Raider	2	Yonif Raider
1	Yonkav	4	Yonif
1	Yonarmed	1	Yonkav
1	Yonzipur	1	Yonarmed
1	Denintel	1	Yonzipur
1	Ki Kav	1	Denarhanud
		1	Denzipur
		1	Denintel
		1	Ki Kav

Sumber: MABES TNI (2021)

d. **Master Plan Sistem Pertahanan IKN**

Sebagaimana dipahami bahwa dalam membangun IKN Nusantara tidak hanya diperlukan penyiapan infrastruktur dan lingkungan saja, tetapi juga perlu diperhatikan aspek-aspek lainnya. Untuk itu diperlukan grand design yang dituangkan ke dalam master plan khususnya bidang pertahanan. Secara umum master plan tersebut dirancang untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas khususnya yang terkait dengan penggunaan teknologi tinggi baik lingkup darat, udara dan laut. Untuk itu master plan yang dibangun berusaha dirancang dengan muatan berbasis teknologi dan *local wisdom* dengan ciri khas *smart defense* serta *smart security*. Selain itu pertahanan yang dirancang juga menggunakan pertahanan aktif berlapis dimana kekuatan darat dikonsentrasikan di sisi utara-barat-timur IKN; kekuatan laut berada

pada sisi timur-pantai ALKI II; dan kekuatan udara difokuskan pada sisi selatan-barat.

e. Kompleksitas Ancaman yang perlu diwaspadai oleh TNI dalam pembangunan IKN.

Melihat perkembangan saat ini, dimana terdapat berbagai ancaman yang perlu diwaspadai oleh TNI karena dapat berdampak pada instabilitas, diantaranya:

1) Konflik SARA.

Meningkatnya isu SARA dalam konteks ini dapat dijabarkan menjadi penggunaan isu primordialisme, yaitu pribumi yang bertentangan dengan asing, dan isu agama terutama semakin terlihat pasca Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2015 dimana terjadi segregasi dalam masyarakat berdasarkan keyakinan. Maraknya isu SARA berkembang diiringi dengan semakin banyak dan aktif masyarakat menggunakan sosial media, sehingga penyebaran informasi palsu (hoaks) dan provokatif yang menyudutkan pihak tertentu semakin meningkat. Hal tersebut berpotensi menciptakan instabilitas nasional, dan bahkan berpotensi menyebabkan kerusuhan di antara sipil.

2) Teorisme dan Radikalisme.

Isu ini merupakan persoalan negara yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Selain para pelaku adalah warga sipil dan dapat membangun jaringan dengan para punggawa teroris di luar kawasan, keberadaannya menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan nasional. Setelah peristiwa peledakan bom di tiga gereja di Surabaya dan diikuti dengan beberapa aksi bom bunuh diri lainnya, Indonesia dapat dinyatakan sedang mengalami kondisi darurat terkait persoalan terorisme di dalam situasi keamanan nasionalnya, sehingga dalam penanganannya diperlukan hubungan sipil-militer yang baik.

3) Penyebaran Hoaks.

Penyebaran hoaks di era digital saat ini semakin massif. Berdasarkan Survei *Katadata Insight Center* (KIC) menunjukkan 76% responden cenderung menggunakan medsos sebagai sumber informasi yang paling mudah diakses.²⁵ Kondisi ini tentu memerlukan perhatian khusus karena ternyata di sepanjang tahun 2021, Kominfo telah melakukan penindakan dengan memblokir sebanyak 565.449 konten negatif dimana penyebaran tersebut menggunakan media sosial sebagai sarana yang paling sering dimanfaatkan.²⁶ Sementara Laporan "2019 *CIGI-Ipsos Global Survey on Internet and Security Trust*" menyatakan media penyebaran hoaks sebagian besar menggunakan facebook dan medsos dan hal ini menjadi perhatian khusus pengguna jejaring internet di dunia,²⁷ karena jumlah pengguna jejaring internet sudah mencapai 4,5 milyar orang atau lebih dari 60 persen penduduk dunia.²⁸

11. Lingkungan Strategis.

Dinamika lingkungan strategis baik nasional, regional ataupun internasional selalu mempengaruhi perkembangan penyelenggaraan pembangunan IKN baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, kecenderungan lingkungan strategis semakin sulit diperkirakan karena ketidakteraturan dan ketidakstabilan semakin menjadi corak dominan yang menuntut suatu tata kelola yang baik sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada bagian ini diuraikan secara singkat kondisi perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan:

21. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/23/masyarakat-paling-banyak-mengakses-informasi-dari-media-sosial>, diakses 11 April 2022 pukul 23.31 WIB.

22. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/03/163216365/data-sebaran-hoaks-sepanjang-2021-terbanyak-soal-pandemi-covid-19?page=all>, diakses 11 April 2022 pukul 20.31 WIB.

23 Lihat <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/14/survei-cigi-facebook-medsos-yang-banyak-digunakan-untuk-menyebarkan-hoaks> diakses 9 April 2022 pukul 12.40 WIB

24. Lihat <https://teknoia.com/data-pengguna-internet-dunia-ac03abc7476> diakses 9 April 2022 pukul 15.40 WIB

a. Global.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis global telah menimbulkan ancaman dan tantangan baru bagi setiap negara yang tidak hanya bersifat tradisional (militer) namun juga non-militer. Pola ancaman dan tantangan tersebut berubah cukup pesat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Dunia memasuki Era Industri 4.0 dan bahkan 5.0 mengakibatkan percepatan modernisasi, khususnya di negara maju, sehingga menimbulkan masalah keamanan (*security dilemma*) yang mewajibkan setiap negara yang belum mampu harus mengimbangi kemajuan tersebut melalui penyesuaian strategi dan kebijakan pertahanan dan keamanannya. Perubahan pola ancaman tersebut merupakan tantangan global yang sedang dihadapi Indonesia baik militer maupun non-militer, meliputi: terorisme dan radikalisme global, kemungkinan perang nuklir, kejahatan siber (dunia maya), bencana alam yang diakibatkan perubahan iklim, perang dagang AS dan Tiongkok, ketegangan di Timur Tengah, hingga isu terkini seperti penyebaran wabah virus Covid-19 yang beberapa waktu memberikan dampak luar biasa bagi kehidupan manusia. Selain itu, interaksi negara-negara *great powers*, seperti Korea Utara, Amerika Serikat, dan Tiongkok juga telah mempengaruhi konstelasi Kawasan Asia Pasifik yang memberikan dampak langsung terhadap politik internasional Indonesia, terlebih Indonesia saat ini sedang membangun IKN. Perkembangan global yang terjadi secara tidak langsung tentu sangat mempengaruhi stabilitas sehingga kondisi tersebut perlu dipahami dengan baik agar tidak mengganggu pembangunan yang sedang berlangsung.

b. Regional.

Perkembangan yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan era digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pertahanan. Akibatnya beberapa negara memandang bahwa perang tidak hanya dapat dilihat dari bentuknya yang terbatas menggunakan senjata namun juga berekspansi pada berbagai aspek kehidupan lainnya seperti sosial-politik, budaya, ekonomi serta lain sebagainya. Dengan

kata lain peperangan dan konflik yang terjadi di suatu negara tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer, tetapi kekuatan nirmiliter yang turut dilakukan oleh aktor non-negara (*non state actor*). Tak terkecuali dalam lingkup regional seperti peredaran narkoba, *illegal logging* hingga sengketa wilayah negara. Dalam lingkup regional telah terjadi peredaran narkoba, *illegal logging* hingga sengketa wilayah negara, hal ini tentu mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dengan negara yang berada wilayah Asia dan juga ASEAN, yang pada akhirnya mempengaruhi politik dalam negeri. Melihat kondisi yang demikian maka diperlukan penanganan yang komprehensif yang tidak hanya konsen membangun pertahanan secara militer namun juga dapat dibangun dan dikembangkan pertahanan pada cakupan nonmiliter.

c. Nasional.

Dalam kondisi internal atau dalam lingkungan nasional Indonesia, faktor lingkungan strategis dibahas melalui pendekatan astagatra. Namun secara spesifik lebih difokuskan pada aspek yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Geografi

Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi geografi strategis karena terletak diantara dua benua dan dua samudera pada dasarnya memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia dalam kemajuan bangsa. Namun tidak hanya keuntungan yang didapat tetapi juga rentan atas permasalahan yang terjadi. Kasus persengketaan wilayah dengan negara-negara lain, seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, Blok Ambalat, Perairan Natuna dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kasus yang terjadi di perairan Natuna merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, sedangkan Tiongkok semakin menunjukkan sikap kurang baik dengan melakukan pelanggaran ZEE atas wilayah perairan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang sedemikian rupa memerlukan penanganan terukur agar kedaulatan wilayah tetap terjaga.

2) Demografi

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa seharusnya membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Namun demikian hingga saat ini persebaran penduduk yang mencapai 18% dari total jumlah penduduk Indonesia ternyata masih terkonsentrasi di pulau Jawa.²⁹ Hal ini berdampak pada ketimpangan di setiap wilayah di Indonesia yang ditandai dengan kesenjangan sosial-ekonomi, tidak meratanya pembangunan, peningkatan jumlah pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain sebagainya. Dalam pembangunan IKN tentu hal ini perlu menjadi perhatian serius agar ketimpangan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

3) Sumber Kekayaan Alam

Indonesia sebagai negara yang memiliki SKA berlimpah, sudah selayaknya Indonesia mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri. Namun sampai saat ini Indonesia masih dilanda krisis kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kedelai bahkan garam. Berbagai laporan menyatakan pertumbuhan rata-rata impor Indonesia mencapai 22%, sementara ekspor hanya tumbuh antara 7-8%. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang masih bergantung kepada impor.³⁰ Disamping itu juga eksploitasi SDA yang tidak terkendali berdampak pada kerusakan lingkungan sehingga mengganggu ekosistem yang seharusnya mampu hidup berdampingan.

4) Ideologi

Ideologi Pancasila yang dimiliki Indonesia pada hakikatnya mampu menjadi landasan dalam membangun keutuhan bangsa. Namun dalam perkembangannya terdapat kecenderungan mudarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan tidak terimplementasikannya Pancasila dalam

25. Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/penduduk-indonesia-masih-terkonsentrasi-di-pulau-jawa> diakses pada 30 Mei 2022 pukul 12.30 WIB.

26. *Ibid.*

kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari masih banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia yang disebabkan kurang baiknya dalam memahami nilai-nilai ideologi bernegara yang baik. Oleh karena itu, pemahaman ideologi Pancasila yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat sehingga perlu dibangun secara optimal.

5) Politik

Sistem politik demokratis yang diterapkan Indonesia merupakan bentuk kemajuan dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sipil khususnya dapat berperan atau berkontribusi dalam memajukan negara. Namun demikian belakangan sistem politik tersebut berdampak pada hubungan sipil-militer, dimana keterlibatan militer dalam menjaga keamanan dalam negeri dengan dasar operasi militer selain perang (OMSP) masih menjadi polemik. Keterlibatan militer seringkali sangat dibutuhkan namun banyak pihak yang menentang karena dinilai melanggar dan bertentangan dengan supremasi sipil. Hal ini masih menjadi perdebatan politik, sehingga memunculkan pro-kontra politis dalam membangun hubungan tersebut.

6) Ekonomi

Kontribusi ekonomi pulau Jawa mencapai 59,0% terhadap PDB nasional. Bandingkan dengan wilayah lainnya seperti Maluku dan Papua yang hanya menyumbang 2,41%. Padahal jika diperhatikan kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap PDB nasional.³¹ Ketimpangan tersebut perlu dipahami dengan baik khususnya bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan utamanya dalam pembangunan IKN berkelanjutan.

7) Sosial Budaya

Upaya mengoptimalkan budaya kolektif masyarakat Indonesia atau yang lebih dikenal dengan budaya gotong royong

27. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/610b9dc3601f5/pertumbuhan-ekonomi-papua-maluku-tertinggi-capai-8-75-pada-kuartal-2>, diakses 1 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

masyarakat masih perlu ditingkatkan, karena dalam membangun IKN tentu perlu melibatkan semua elemen masyarakat agar pembangunan ibukota negara dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sikap kolektif ini penting untuk menghindari terjadinya sikap konfrontatif dan antagonis, serta menciptakan sifat konsultatif, dan kerjasama hingga menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

8) **Pertahanan dan Keamanan**

Sesuai dengan Nusantara (IKN), maka setiap ancaman pertahanan dan keamanan merupakan faktor lingkungan strategis yang paling berpengaruh, baik bersifat militer maupun non-militer. Kondisi ini perlu dipahami dengan baik karena membawa dampak luas terhadap stabilitas nasional.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Pada dasarnya pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta karena inti dari pemberdayaan pertahanan adalah merancang dan menyiapkan rakyat sedini mungkin sebagai komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara. Adapun peran TNI sebagai komponen utama juga perlu dipahami dengan baik karena merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Untuk itu melalui pengoptimalan sumber daya yang ada dimana hal tersebut sebagai bagian di dalam pemberdayaan wilayah pertahanan diharapkan mampu memperkuat sistem pertahanan negara khususnya dalam mendukung tercapainya cita-cita pembangunan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada bagian ini menjelaskan perihal beberapa pembahasan yaitu: peran TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di IKN, kendala-kendala yang dihadapi TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan IKN dan strategi TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan guna pengamanan IKN

13. Peran TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di IKN.

a. Umum.

Mengacu pada regulasi yang telah dijelaskan sebelumnya khususnya pada UU No. 3 tahun 2002 yang menempatkan TNI sebagai unsur utama pertahanan negara yang kemudian didukung oleh komponen cadangan dan pendukung dalam menjaga wilayah Indonesia. Pelibatan berbagai unsur tersebut didasarkan atas kompleksitas AGHT yang semakin berkembang sehingga tidak mungkin hanya dapat dilakukan oleh TNI namun juga memerlukan keterlibatan sumber daya lainnya. Pelibatan unsur-unsur lain dalam pertahanan negara lebih dikenal dengan sistem pertahanan negara bersifat semesta (Sishanta) yakni melibatkan seluruh komponen serta sumber daya yang ada untuk bersama-sama bekerjasama dan bersinergi didalam menegakkan kedaulatan negara hingga akhirnya mampu mencapai cita-cita nasional.

Sishanta pada dasarnya telah dijelaskan di dalam UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, dan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.³² Pelaksanaan Sishanta difokuskan pada upaya membangun kesadaran atas hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dimana hal tersebut menjadi penting untuk dipahami agar dapat membantu di dalam keberlangsungan bernegara. Adapun pada konteks ini sistem pertahanan yang diterapkan Indonesia memiliki sifat *inward looking*, yaitu berusaha mencemati persoalan yang ada di dalam serta mencoba menyelesaikannya. Hal ini dilakukan jika terjadi perang terjadi di Indonesia yang menimbulkan berbagai ancaman atau potensi ancaman maka dapat segera diatasi sehingga tidak menimbulkan eksekusi buruk bagi stabilitas nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami bahwa Sishanta memiliki cakupan yang cukup luas karena tidak hanya menyangkut *hard power* namun juga berhubungan erat dengan membangun *soft power* yang sifatnya sangat dinamis dan kompleks. Hal ini menjadi penting dilakukan karena saat ini ancaman tidak hanya identik dengan perang secara fisik, namun juga berkembang ke arah yang multidimensional.

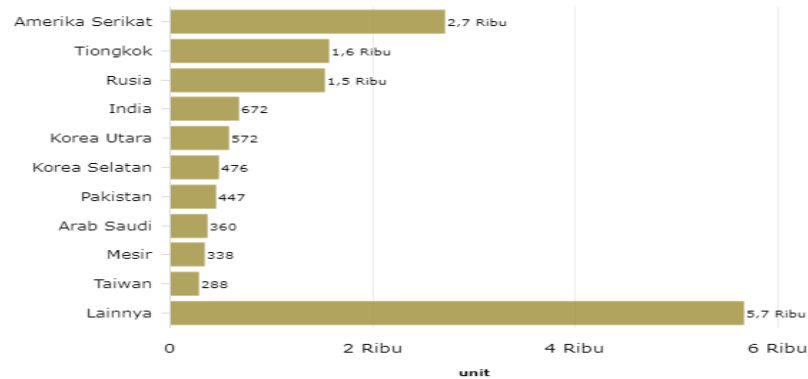
Sishanta yang dikembangkan bangsa Indonesia mengacu pada kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi wilayah yang strategis yang dimiliki, yaitu berada diantara dua benua dan dua samudera sehingga secara tidak langsung memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan yang mungkin saja terjadi. Letak wilayah Indonesia yang strategis tersebut, tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga ancaman keamanan yang besar, antara lain ancaman militer dari negara lain maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Sebagai contoh, banyaknya kapal asing memasuki wilayah Indonesia untuk mencuri ikan atau kekayaan alam lainnya, adanya kegiatan Organisasi Papua Merdeka

28. UUD 1945.

(OPM) atau disebut juga sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang masih menjadi persoalan bagi kedaulatan negara Indonesia, serta beberapa persoalan lain seperti peredaran narkoba, terorisme, konflik, wabah penyakit, dan *cyber crime* menjadikan Indonesia sebagai negara potensial untuk diserang.

Mencermati berbagai kondisi ancaman yang dihadapi Indonesia tersebut diperlukan upaya meningkatkan kemampuan pertahanan nasional agar tidak berakhir dengan sebuah peperangan. Upaya meningkatkan kemampuan pertahanan dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan kemampuan SDM serta peralatan yang memadai sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman yang terus berkembang. Berdasarkan fenomena kondisi kemampuan militer Indonesia saat ini yang masih tertinggal dari negara-negara lain, berdasarkan data dari situs *Global Firepower* yang dirilis tahun 2021, alutsista Indonesia menempati peringkat ke 16 di dunia dari 140 negara. Indeks kekuatannya berada di level 0,2684, di bawah Jerman (0,2519) dan di atas Arab Saudi (0,3231).³³ Bahkan lebih tinggi daripada Australia, Israel, dan Spanyol. Untuk Indonesia sendiri dalam hal ini merupakan negara yang memiliki kekuatan militer terkuat khususnya di kawasan Asia Tenggara. Situs ini mengukur kekuatan tersebut berdasarkan jumlah sumber daya manusia, angkatan udara, darat, dan laut, serta sumber daya alam, logistik, keuangan, dan geografi.

29. <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/610ce05b8eba8/daftar-kekuatan-militer-ri-yang-berada-di-peringkat-16-dunia>, diakses 3 Juli 2022 pukul 19.21 WIB.

Gambar 3.1: 10 Besar Armada Tempur Aktif Terbanyak di Dunia

Sumber: *Global Firepower (2021)*

Kondisi pertahanan negara-negara di dunia tentu perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan eksese buruk bagi situasi nasional. Namun demikian dalam menghadapi ancaman faktual, perlu dipahami didalam penanganannya memerlukan pendekatan yang multidimensional yakni tidak hanya mengedepankan unsur militer namun juga perlu memperhatikan dimensi non-militer. Dalam lingkup ini maka aktornya tidak hanya terpaku pada Negara, namun juga berasal dari *non-state actors* maupun *sub-state groups*. Untuk itu memerlukan kerjasama antara sipil dan militer dalam menangkal ancaman aspek militer dan non-militer. Perkembangan ancaman non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, karena sifatnya sayang sulit diprediksi mengingat sifatnya yang multidimensional. Ancaman ini tentu memberikan dampak sistemik dan terkadang sulit dikalkulasi mengingat tidak memiliki ukuran yang jelas atas dampak yang ditimbulkan. Karenanya perlu dipahami dan diantisipasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mempersiapkan diri atas ancaman yang berkembang, maka diperlukan upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian individu, serta tata kelola institusi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini penting dipahami karena dalam membangun Sishanta diperlukan pengelolaan berbagai sumber daya secara maksimal, termasuk pelibatan pihak-pihak terkait seperti TNI/Polri, Pemerintah (K/L) dan

masyarakat agar negara cukup tangguh menghadapi berbagai ancaman yang ada guna menjaga keutuhan NKRI. Melalui pelibatan unsur-unsur terkait diharapkan akan lebih mampu dalam mengatasi berbagai ancaman yang dapat menimbulkan instabilitas termasuk dengan melibatkan TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

Terkait dengan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan (komponen utama) hanya menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Tugas pokok TNI disebutkan dalam UU No. 34 Tahun 2004 pasal 7, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan pada ideologi Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara.³⁴ Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas pokok TNI tidak hanya berkaitan dengan Operasi Militer untuk perang tetapi juga mencakup OMSP yang dimana salah satu tugasnya yang cukup strategis yakni melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa TNI diposisikan sebagai ujung tombak dalam upaya mempertahankan NKRI, sehingga strategi Sishanta sangat penting diperhatikan dalam menjaga kedaulatan negara. Mengacu pada pelaksanaan Sishanta, dapat dipahami bahwa tanggungjawab menjaga negara bukan hanya tugas TNI tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh komponen negara guna mewujudkan cita-cita nasional. Dengan kata lain, upaya membangun pertahanan semesta memerlukan pengelolaan yang baik dan terukur, sehingga setiap komponen pertahanan negara dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

b. **Fungsi.**

Berkenaan dengan hal tersebut, maka salah satu fungsi yang melekat pada TNI dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada dapat

30. *Ibid.*

dilakukan melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Dalam pemberdayaan tersebut sebagaimana diketahui juga dilakukan oleh TNI dari matra-matra yang ada dengan tujuan menjaga dan melindungi Indonesia dari berbagai ancaman yang kian kompleks dan berkembang. Apabila ancaman-ancaman tersebut tidak mampu diantisipasi maka akan berdampak pada instabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa fungsi TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan memiliki peran strategis karena dipandang mampu mendukung terwujudnya stabilitas nasional. Perihal pemberdayaan pertahanan dijelaskan pada Permenhan No. 40 tahun 2011 yang secara umum memiliki cakupan:³⁵

- 1) Mendukung pemerintah dalam rangka mempersiapkan segala potensi-potensi nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan secara dini. Kekuatan pertahanan yang berasal dari potensi nasional akan digunakan untuk mendukung OMP dan OMSP yang pelaksanaannya berdasarkan pada kepentingan pertahanan dan mengacu pada sistem pertahanan semesta.
- 2) Membantu pemerintah dalam rangka penyelenggaraan latihan dasar kemiliteran bagi warga negara dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan dan memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan pendukung untuk menghadapi ancaman.

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan yang menjadi pedoman bagi TNI yakni mengacu pada berbagai regulasi-regulasi yang ada. Hal ini dilakukan agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaan berbagai program yang dijalankan. Sebagai contoh menghadapi berbagai kompleksitas ancaman maka perlu dipersiapkan proteksi dini melalui edukasi serta berbagai sosialisasi yang dapat dilakukan dimana kesemuanya bertujuan agar dapat terbangun pondasi yang baik bagi masyarakat

31. *Ibid.*

sehingga tidak mudah terpengaruh dengan dinamika yang terjadi. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, maka TNI dituntut untuk mampu memberdayakan segala potensi yang ada agar mampu mengoptimalkan fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan sebagaimana diamanatkan UU, terlebih dalam pembangunan IKN. Fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan salah satu hal yang penting dilakukan dalam pembangunan IKN agar sesuai dengan peruntukannya.

Untuk itu maka pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan hal yang dilakukan secara terencana dan terukur sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu melalui pemberdayaan pertahanan diharapkan agar semakin memperkuat suatu wilayah di dalam menghadapi kompleksitas ancaman yang semakin hari kian berkembang sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif.

14. Kendala-kendala Yang Dihadapi TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pembangunan IKN.

a. Umum.

Pemindahan Ibukota suatu negara pada dasarnya bukan merupakan hal baru yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Namun yang perlu dipahami pemindahan Ibukota tersebut tentu didasarkan atas berbagai pertimbangan seperti dilakukan Indonesia yang sebelumnya Ibukotanya berada di Jakarta (pulau Jawa) kemudian pindah ke wilayah Kalimantan Timur. Visi IKN pada dasarnya mengacu pada pilar pembangunan Indonesia 2045 yakni pengembangan SDM dan IPTEK, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu IKN diharapkan mampu menjadi kota paling berkelanjutan di dunia dengan indikasi aman, terjangkau, sirkuler dan tangguh, ramah lingkungan terhubung serta mudah diakses. Disamping itu juga IKN dituntut mampu menjadi simbol identitas bangsa serta dapat menjadi penggerak ekonomi dimasa mendatang.

Dalam pemindahan Ibukota suatu negara seperti diketahui didasarkan pada berbagai pertimbangan. Laporan Bappenas tahun 2021 menjelaskan pemindahan Ibukota dikarenakan masih terjadinya ketimpangan baik dari berbagai aspek kehidupan termasuk Hankam sehingga diperlukan adanya penyesuaian agar kemajuan pembangunan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa.³⁶ Prinsip pemerataan dalam pembangunan merupakan hal yang perlu dipahami secara baik karena ternyata dalam konteks pembangunan berusaha untuk menekan terjadinya ketimpangan antar tiap-tiap daerah. Untuk itu proses pembangunan perlu dilakukan secara baik agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun kriteria pemilihan Kaltim didasarkan atas tersedianya lahan luas sehingga mampu mengurangi biaya, kondisi geografis yang berada ditengah wilayah Indonesia, potensi konflik dinilai rendah karena cukup terbuka atas pendatang, dukungan air dan tanah yang memadai, minim bencana dekat dengan kota yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal dan memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Dalam lingkup pertahanan dimana TNI merupakan faktor kunci atas terwujudnya stabilitas maka perlu dipahami dengan baik khususnya terkait dengan posturnya dalam pembangunan IKN. dengan membangun postur TNI yang baik dan sesuai dalam pembangunan IKN diharapkan akan mampu mewujudkan suatu tatanan yang ideal dalam mendukung pembangunan IKN yang berkelanjutan.

b. Kebijakan.

Panglima TNI telah membuat kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam rencana pembangunan satuan TNI khususnya berkenaan dengan Pengamanan Ibukota Negara di wilayah Kalimantan Timur dalam mengoptimalkan tugas pokok TNI apabila dihadapkan adanya perkembangan lingstra yang dinamis dengan ancaman teknologi destruktif serta berbagai tantangannya. Untuk itu Panglima TNI

32. *Ibid.*

menetapkan 11 (sebelas) Kebijakan Prioritas Pembangunan TNI³⁷, sebagai berikut:

- 1) Merancang berbagai program yang dalam mendukung MEF. Adapun upaya ini mengacu pada berbagai kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Untuk itu dalam pelaksanaannya maka perlu menjamin integritas teritorial baik wilayah darat, laut maupun udara serta ruang di dalamnya; kedaulatan nasional; menjamin keamanan dan keselamatan negara khususnya seluruh warga negara dan *national interest*.
- 2) Melakukan penyesuaian atas Doktrin TNI dan Doktrin Angkatan agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis sehingga mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah yang dapat mengganggu stabilitas. Untuk itu maka perlu juga membangun kerjasama dan sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- 3) Penyempurnaan organisasi TNI menjadi lebih adaptif dan *learning organization*. Salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ter-update serta mampu mendukung dalam mengatasi berbagai ancaman yang ada. Untuk itu maka di dalam pelaksanaannya memerlukan pengkajian yang komprehensif atas kondisi saat ini sehingga dapat diketahui secara baik atas hal-hal yang perlu penyesuaian termasuk didalamnya berkenaan dengan validasi dan pengembangan organisasi agar terdapat kesesuaian di dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dijalankan nanti.
- 4) Pengembangan sistem pengelolaan SDM atau personel TNI yang berbasis kompetensi. Langkah ini sebagai bentuk meningkatkan kemampuan kapabilitas dan profesionalisme agar lebih siap di dalam menjalankan kompleksitas tugas yang dinamis salah satunya ditandai dengan perkembangan teknologi.
- 5) Pembangunan TNI AD menjadi kekuatan terpusat, dan pendukung. Adapun sebagai kekuatan terpusat, dikembangkan agar memiliki

33. Kep Panglima TNI No. Kep/1/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI tahun 2020.

satuan pemukul strategis untuk menanggulangi 4 (empat) *Trouble Spots*. Berkenaan dengan kekuatan kewilayahan, nantinya akan diberdayakan sebagai unsur proteksi dini dan penangkalan serta memiliki kemampuan melakukan misi-misi kemanusiaan. Sementara untuk pendukung kekuatan wilayah, disusun dalam unit-unit kecil yang memiliki mobilitas tinggi. Untuk itu dalam modernisasi, maka program mekanisasi Infanteri akan terus dilanjutkan sehingga dapat lebih optimal. Disamping itu juga langkah strategis lainnya yakni dengan memberikan dukungan dalam peningkatan mobilisasi udara dan Kavaleri udara serta mengintegrasikan Arhanud ke dalam *Network Centric Warfare*.

- 6) Pembangunan matra TNI AL dengan penyusunan Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri atas berbagai kesiapan alutsista seperti kapal perang, pesawat udara, Marinir dan pangkalan. Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu pembangunan kekuatan pemukul laut strategis dalam menghadapi 2 (dua) *Trouble Spots*. Selain itu pemenuhan kebutuhan kapal selam dan kapal kombatan lainnya akan dilanjutkan secara bertahap sebagai pertimbangan kekuatan dan fungsi *deterrent*. Sementara itu dilakukan juga pengembangan kemampuan dalam pelaksanaan tugas sebagai anti kapal permukaan air dan anti kapal selam. Untuk Marinir kemampuan akan ditingkatkan menjadi ekspedisioner dan *multi-role*.
- 7) Pembangunan TNI AU dalam mencapai *Air Supremacy* atau *Air Superiority*. Sasaran yang ingin dicapai yaitu kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi 2 *Trouble Spots* dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur *multi-role* dari generasi empat setengah. Selain itu pembangunan TNI AU juga difokuskan pada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada berbagai lingkup mulai dari nasional hingga global sehingga diharapkan pembangunan pertahanan akan lebih baik. Disamping itu sistem pertahanan yang ada pada lingkup udara berusaha untuk diintegrasikan dengan matra-matra lainnya dalam *Network Centric*

Warfare. Pada pembangunan kekuatan selanjutnya juga akan mengaplikasikan konsep berperang dengan *Unmanned Combat Aerial Vehicle* (UCAV) yang berbasis satelit.

- 8) Pembangunan satuan khusus dimana keanggotaannya terdiri dari para personel khusus Trimatra. Adapun dalam pelaksanaannya, satuan ini akan diarahkan sebagai pelaksana perang-perang inkonvensional dan sebagai *enabler* dalam perang konvensional. Dengan kata lain, satuan ini merupakan bagian khusus yang konsen terhadap beberapa ancaman yang kemungkinan akan terjadi.
- 9) Melakukan pengembangan sistem operasi Trimatra yang berbasis teknologi yang meliputi *Network Centric Warfare*, C4ISR dan *Cyber Warfare*.
- 10) Meningkatkan diplomasi militer dan peningkatan kontribusi dalam rangka mewujudkan *national interest*, berperan signifikan secara regional dan berkomitmen dalam upaya menjaga perdamaian dunia sebagaimana tertuang pada ideologi negara UUD 1945. Dalam pelaksanaannya dipraksiskan melalui jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya dalam bidang Hankam melalui pelaksanaan operasi bersama. Untuk itu TNI sebagai garda terdepan dalam pertahanan akan terus berupaya dalam meningkatkan kemampuan sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Disamping itu juga, TNI juga memiliki peran strategis dalam membangun kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara lain dalam upaya membangun *confidence building measures* TNI.
- 11) Membangun sistem pengadaan Alutsista yang berasaskan pada *effect based, interoperability* dimana kesemuanya dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Kebijakan yang telah dijelaskan diatas pada dasarnya terkait erat dengan upaya membangun postur pertahanan baik yang terdiri atas kekuatan, kemampuan dan gelar. Pada konteks kekuatan berkenaan

dengan komponen utama yakni (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU), komponen cadangan dan pendukung. Untuk kemampuan terkait kapabilitas dalam lingkup intelijen, pertahanan, diplomasi, dan dukungan. Sedangkan gelar menyangkut membangun sistem pertahanan yang baik diseluruh wilayah NKRI. Hal ini tentu perlu dipahami secara baik agar postur pertahanan yang diharapkan khususnya di dalam membangun IKN dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemindahan MABES TNI ke wilayah Kalimantan Timur berdekatan dengan Ibu Kota Negara merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan stabilitas. Karena sebagaimana diketahui penempatan Ibu Kota Negara tentu tidak terlepas dari berbagai potensi ancaman. Guna mengantisipasi hal tersebut maka Mabes TNI akan membentuk Kodam khusus pengamanan Ibu Kota Negara di Kaltim dan satuan-satuan operasional yang bertugas untuk mengamankan Ibu Kota Negara, serta penambahan gelar kekuatan baik Kodam VI/Mulawarman maupun Kodam XII/Tanjungpura. Dibentuknya satuan pengamanan Ibu Kota dimaksudkan agar dapat mempertahankan Ibu Kota Negara dari berbagai ancaman baik ancaman tradisional berupa ancaman Militer dari aktor negara (*state actor*) yang ingin mengganggu, mengancam, atau merusak kesatuan serta kedaulatan NKRI serta ancaman non tradisional berupa ancaman teroris, perampokan, kriminilitas, penyelundupan narkoba dan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di tengah masyarakat.

Untuk itu pertahanan IKN dalam menghadapi berbagai ancaman tersebut pada dasarnya memerlukan upaya terukur namun tetap berpedoman pada kesemestaan, defensif aktif, dan pertahanan berlapis. Melalui hal-hal tersebut, maka akan terbangun sistem pertahanan yang mampu memiliki kesiapan dalam menghadapi kompleksitas ancaman dengan tidak hanya melibatkan salah satu komponen namun juga mengoptimalkan segala sumber daya yang ada hingga akhirnya akan terbangun sistem pertahanan yang merata.

c. Kendala-kendala yang dihadapi.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang akan dilakukan dalam pengamanan wilayah IKN, diantaranya adalah :

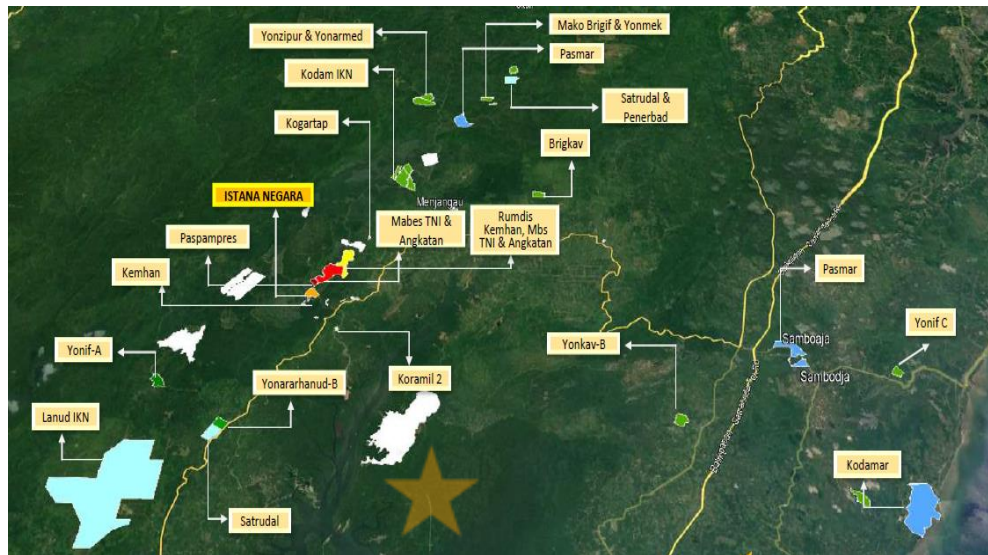
1) Perencanaan Postur TNI.

Jika mengacu pada postur TNI, perencanaan dalam membangun pertahanan IKN yang ada saat ini terdiri atas:

- a) Pemindahan 60 ribu aparatur sipil negara, TNI dan Kepolisian ke IKN;
- b) TNI Angkatan Darat (AD) merencanakan akan membentuk Kodam khusus IKN dan satuan pendukung yang dilengkapi antara lain unit produksi, depo cadangan, unit penangkal senjata pemusnah masal, satuan kesehatan, bunker multifungsi, dan satelit militer;
- c) TNI Angkatan Laut (AL) merencanakan membentuk Pasukan Marinir 4 dengan personil dari Batalyon Infanteri 8/Marinir dan Batalyon Infanteri 10/Marinir; dan
- d) TNI Angkatan Udara (AU) merencanakan pembangunan pangkalan udara baru di wilayah IKN, menggeser Skuadron 17 dan Skuadron 45 ke Kaltim dalam menunjang mobilitas strategis Presiden. Selain itu rencana relokasi dan pembentukan satuan baru, rencana peningkatan status pangkalan udara dan laut, serta realokasi dan pelengkapan alutsista TNI.

Berdasarkan hal diatas maka sudah seharusnya pemindahan satuan TNI di IKN tentu perlu dipersiapkan secara matang agar upaya strategis tersebut tepat sasaran. Secara umum rencana pembangunan Satuan TNI di IKN Nusantara dapat tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.2: Rencana Pembangunan Satuan TNI di IKN Nusantara



Sumber: TNI (2022)

2) Kondisi pertahanan dalam pengamanan IKN.

Penyiapan unsur militer di IKN dalam pembangunan postur TNI untuk mewujudkan pertahanan IKN pada hakikatnya sangat dibutuhkan karena akan berdampak pada terwujudnya stabilitas. Sebagai contoh pada pembangunan Kodam khusus pengamanan Ibu Kota, harus dapat dilengkapi dengan satuan operasional yang memiliki tugas melaksanakan pertempuran darat dalam rangka Pam Ibu Kota, melaksanakan kegiatan Pam VVIP, melaksanakan kegiatan Protokoler Negara, melaksanakan kegiatan Kegarnizunan, melaksanakan kegiatan pengamanan Obyek Vital yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, mengatasi bencana yang terjadi di wilayah Ibu Kota Negara serta melaksanakan Pembinaan Teritorial, walaupun dalam penentuan *exact location* dari rencana satuan operasional yang akan di bentuk masih bersifat pra anggapan, akan tetapi rencana pembangunan operasional satuan pengamanan tetap harus di bangun baik Satpur, Satbanpur dan Satbanmin yang harus diawaki dengan prajurit yang profesional dan dilengkapi dengan alutsista modern yang dapat menjamin keamanan IKN dari berbagai ancaman. Tidak kalah

pentingnya keberadaan satuan kewilayahan yang ada dalam jajaran satuan pengamanan IKN harus mampu menjamin pembinaan kepada masyarakat yang berada di sekitar IKN melalui Program Teritorialnya agar masyarakat sadar sebagai bagian dari pasukan pengamanan IKN. Dalam penyiapan satuan Pengamanan IKN harus dapat dilakukan secara terintegrasi khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dengan angkatan lain ataupun dengan instansi lain.

Adapun kondisi pertahanan di wilayah IKN perlu dipahami dengan baik karena secara umum ada beberapa faktor penting yang apabila pertahanan tidak dikelola dan dipertimbangkan secara baik dapat menjadi suatu ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI dalam pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Provinsi Kaltim tersebut. Adapun kondisi yang dimaksud, yaitu:³⁸

- a) Mendekati garis perbatasan darat dengan Malaysia sepanjang 2.062 km.
- b) Mendekati batas wilayah laut Malaysia.
- c) Berada diantara jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II.
- d) Berada dekat dengan *Flight Information Region* (FIR) negara tetangga (Singapura FIR, Kinabalu FIR dan Manila FIR).
- e) Mendekati lokasi gelar kekuatan militer negara tetangga dan kawasan (Malaysia, Brunai, Singapura, Filipina, Vietnam, China dan US Indopacom).

- 3) Keterbatasan dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di wilayah IKN.

Salah satu fungsi penting yang dapat dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan negara adalah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Namun demikian dalam

34. MABES TNI. 2022. Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Aspek Pertahanan Dan Keamanan.

pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan di Wilayah IKN masih menghadapi berbagai keterbatasan diantaranya:

- a) Keterbatasan dari segi kuantitas SDM dan kemampuan mendukung keberlanjutan pembangunan IKN. Sebagai wilayah yang dalam proses pembangunan tentu membutuhkan SDM atau personel yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi. Berdasarkan keterangan Panglima TNI dibutuhkan sekitar 30-50 ribu personel dalam semua matra pertahanan³⁹ sehingga dengan demikian diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya;
- b) Belum terbangunnya sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan TNI dalam mendukung pembangunan IKN. Selain terkait dengan personel atau SDM, sarana prasarana hendaknya juga menjadi perhatian penting mengingat keberadaan personel juga turut memerlukan kesiapan sarpras tersebut agar pelaksanaan tugas khususnya di dalam pemberdayaan wilayah pertahanan dapat dilakukan secara optimal; dan
- c) Belum terbangunnya sinergi dalam upaya TNI melalui pemberdayaan wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan IKN. Jalinan kerjasama pada dasarnya merupakan hal penting yang diharapkan dapat dibangun secara baik, terlebih dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang menekankan pentingnya tercipta suatu tatanan yang baik tidak hanya terbatas pada unsur TNI namun juga pihak-pihak lainnya sehingga mampu mendukung tercapai tujuan bersama. Berbagai masalah tersebut tentunya perlu dipahami dengan baik agar tidak menimbulkan eks

35. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217132535-20-760439/andika-ungkap-4500-hektare-lahan-di-ikn-untuk-tni-bangun-kodam>, diakses 1 September 2022 pukul 19.21 WIB.

yang kurang baik dalam upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

15. Strategi TNI Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Guna Pengamanan IKN.

a. Umum.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang dilakukan TNI pada dasarnya sebagaimana telah dijelaskan mengacu Permenhan No. 40 Tahun 2011, dimana dalam regulasi tersebut menjelaskan perlu adanya strategi pencapaian dalam pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yang dapat dilihat perencanaan yang dibangun baik dari jangka pendek dan panjang. Secara teoritis perencanaan merupakan upaya yang didesain atau disusun secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁴⁰ Adapun perencanaan tersebut ditransformasikan ke dalam mekanisme pentahapan beberapa aspek, meliputi; unsur-unsur pokok yang dibutuhkan, waktu, dan tahapan pencapaian sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terukur dan efektif.

Dalam skala jangka pendek dilakukan melalui mengarahkan berbagai potensi yang ada menjadi kekuatan pertahanan yang berorientasi mendukung pelaksanaan OMSP. Sementara dalam jangka panjangnya, dilakukan dengan penyiapan SDM (warga negara) serta sarpras agar dapat diproyeksikan menjadi komponen pendukung dan cadangan yang berorientasi mendukung pelaksanaan OMP. Hal ini tentu diperlukan terlebih di dalam pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara yang direncanakan oleh pemerintah pusat yaitu di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara provinsi Kalimantan Timur merupakan bagian dari wilayah Kodam VI/MIW. Wilayah Kodam VI/MIW dibagian utara berbatasan langsung dengan Negara sahabat yaitu Malaysia.

37. *Ibid.*

Terkait kondisi tersebut maka dalam mendesain sebuah kekuatan satuan pengamanan Ibu Kota Negara selain harus mencakup SDM, alutsista, sarana, pangkalan, daerah latihan, organisasi dan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan militer, perlu juga mempertimbangkan kekuatan darat yang dimiliki negara sahabat seperti Malaysia khususnya kekuatan Tentara Diraja Malaysia (TDM) guna mewujudkan perimbangan kekuatan. Disamping itu desain kekuatan TNI sebagai satuan khusus pengamanan Ibu Kota juga harus memperhitungkan ancaman dari dalam yang dapat berpengaruh terhadap kondisi stabilitas Ibu Kota Negara baik berupa bencana alam maupun konflik di dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hal-hal di atas maka TNI perlu mengoptimalkan fungsinya khususnya berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan agar mampu mendukung keberlanjutan pembangunan IKN. Yang perlu dipahami pemberdayaan pertahanan pada dasarnya bertumpu dengan berusaha mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu pemberdayaan wilhan tidak hanya berkuat pada lingkup militer namun juga memiliki jangkauan yang luas atau memiliki sifat multidimensional. Untuk itu dalam pemberdayaan wilhan penting membangun integrasi dan sinergi atas fungsi Kementerian/LPKN dalam membina sumber daya menjadi sebuah kekuatan pertahanan yang kuat sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan. Oleh karenanya pemberdayaan pertahanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya secara terintegrasi, berkelanjutan serta menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi.

b. **Strategi TNI dalam pemberdayaan wilayah dalam pengamanan IKN.**

Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan TNI guna mendukung pembangunan IKN menurut analisa penulis mendasarkan atas kebijakan yang ada, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pemberdayaan SDM.

Dalam konteks pemberdayaan SDM pada dasarnya diarahkan agar mampu mewujudkan kualitas kemampuan, keterampilan, dan kepribadian, serta sikap mental sebagai warga negara yang memiliki motivasi keuletan, etos kerja dan semangat pengabdian untuk membangun bangsa dan negara. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan penyelenggaraan diklat yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun dalam pemberdayaan SDM maka perlu juga ditopang dengan jaminan kesehatan, dan kesejahteraan sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas SDM tersebut. Kondisi ini perlu dipahami karena kualitas SDM yang baik harus dapat menjamin ketersediaan komponen utama, Komcad dan Komduk pertahanan negara yang diharapkan siap menjalankan tugas-tugasnya. Penyelenggaraan pembinaan potensi SDM pertahanan negara dalam pembangunan dan penggunaan komponen pertahanan merupakan dua substansi yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh untuk itu perlu dilakukan secara terencana, terukur, efektif dan efisien. Tentunya upaya tersebut perlu didukung oleh pihak-pihak terkait seperti Kemhan yang mendorong Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan kegiatan penyiapan kualitas SDM berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK terkait dalam menyelenggarakan pendidikan atau kursus keterampilan atas berbagai keahlian tertentu. Penyiapan kualitas manusia bertujuan tidak hanya cakap dalam hal intelektual namun juga memiliki nasionalisme yang baik dalam membangun bangsa. Di samping itu dalam penyiapan SDM maka harus didukung dengan pembinaan kehidupan keagamaan dengan mengutamakan dialog sehingga mampu menghindari kekerasan, kebebasan berpolitik, terbangunnya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta peningkatan rasa aman masyarakat. Berbagai hal diatas perlu

menjadi perhatian serius di dalam memberdayakan manusia sebagai faktor utama dalam kehidupan bernegara.

2) Kesiapan tiga matra.

Adapun terkait dengan hal tersebut, TNI yang terdiri dari tiga matra perlu membangun kesiapannya sehingga diharapkan mampu menjalankan tugas-tugasnya secara optimal. Hal ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a) TNI AD.

TNI AD akan membentuk Kodam khusus IKN yang di dalamnya terdiri atas Makodam; 1 Brigif Khusus IKN (Mabrigif, 3 Yonmek); 1 Brigkav (Mabrigkav & 2 Yonkav); 1 Yon Armed 155 GS (Dilengkapi Saluting Gun Utk Bakhor); 1 Menarhanud (Mamenarhanud & 3 Yonarhanud Jarak Pendek, Sedang & Jauh); 1 Yonzipur (Dgn Puan Nubika & Jihandak); 1 Yonhub; Unsur Balakdam (Satuan Zeni, Pal, Hub, Bekang, Kes, Ajen, Keuangan, POM, Hukum, Penerangan, Infolahtha, Bintai & Jasmani); 2 Satkowil Setingkat Kodim Tipe A & Koramil disesuaikan Luas Wil & Ops Binter; dan 1 Flite Penerbad. Langkah straregis ini juga perlu didukung dengan upaya-upaya pendukung, seperti: Pemenuhan kesisteman MLRS Multi Kaliber; Modernisasi Meriam Arhanud; Modernisasi Yonpur Ranpur Inf Roda Ban; Field Artillery; Cavalery; Multipurpose Armored Vehicle dan Peningkatan Pangkalan Satuan.

Gambar 3.3: Konsep Gelar Kekuatan TNI AD di IKN



Sumber: Mabas TNI AD (2022)

b) TNI AL.

Untuk satuan AL perlu dibentuk satuan strategis seperti Kodamar IKN Samboja, Kodamar IKN Melawai, Pasmar IKN Samboja, Pasmar IKN Sepaku, Lanudal Type B (Sepinggan). Kemudian merelokasi Mabas, Balakpus (Dispenal, Diskumal, Disminpersal, Diskual, Disfaslanal & Disbekal) Satkapal Koarmada (Satkor & Satkat Koarmada II). Adapun untuk mendukung pelaksanaan tugas, maka perlu didukung dengan berbagai gelar, salah satunya gelar Coastal Surveillance (Permukaan & Bawah Permukaan), mencakup Sepanjang ALKI II, Selat Lombok, Selat Bali, Selat Makassar Laut Sulawesi bagian Barat. Untuk mendukung pelaksanaan tugas juga perlu didukung dengan pembangunan Sub Marine; Frigate; Marine Weaponry and Article; Coastal Defense; dan Peningkatan Pangkalan Satuan.

Gambar 3.4: Konsep Gelar Kekuatan TNI AL di IKN

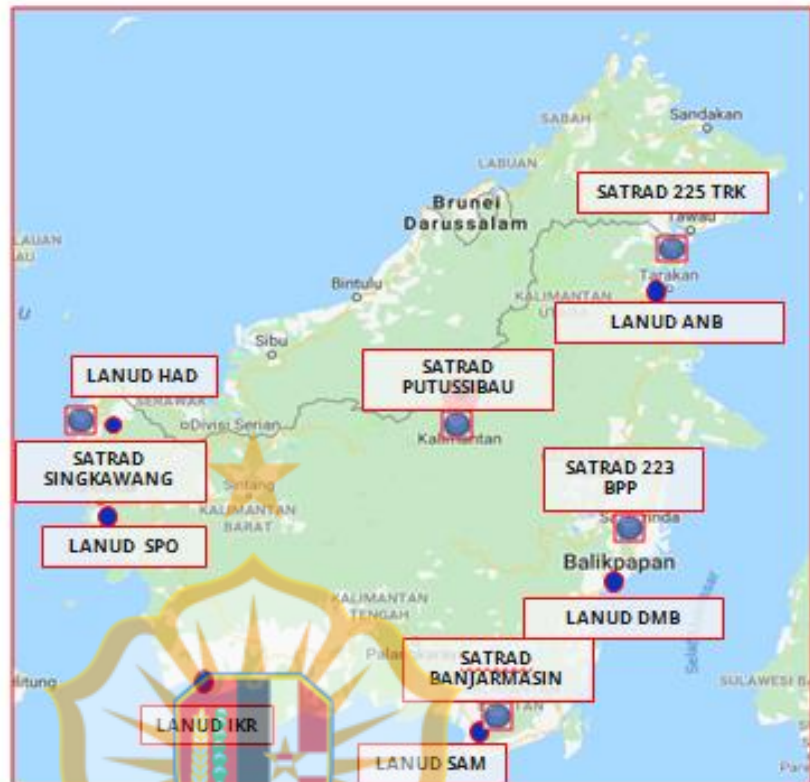


Sumber: Kementerian Pertahanan (2022)

c) TNI AU.

Sebagai satuan penting dalam pertahanan khususnya lingkup udara, maka dalam pengamanan wilayah IKN diperlukan satuan-satuan baru, seperti: Lanud IKN (R/W 4000 X 60 M), Wing Udara, Skadron Helikopter, Skadron Jet Tanker, Skadron Teknik, Kosekhanudnas Ikn, Satrudal Hanud Js Ikn, Detasemen Hanud, Rumah Sakit Tipe B, Shelter Pespur & Ready Ammo. Kemudian perlu juga melakukan relokasi satuan diantaranya: MABESAU, Skadud 17 VVIP/VIP, SKADUD 45 VVIP/VIP, dan Yonko Paskhas 467.

Gambar 3.5 : Konsep Gelar Kekuatan TNI AU di IKN



Sumber: Kementerian Pertahanan (2022)

3) Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan (SDA/SDB).

Dalam pemberdayanya memiliki cakupan yang luas, salah satunya meliputi SDA maupun SDB diharapkan dapat dioptimalkan untuk kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam lingkup makro dan mikro yang dapat menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan SDA/SDB harus menjadi perhatian pemerintah di daerah dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan pertahanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

a) Pemberdayaan SDA.

Dilaksanakan oleh unsur-unsur terkait termasuk di dalamnya Pemda untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional yang diarahkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat ditempuh dengan pengelolaan dan pengeksploitasi potensi SDA yang ada seperti energi, sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, dan lain sebagainya yang dapat dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan potensi SDA tersebut juga perlu mengutamakan kemampuan SDM yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Faktor SDM merupakan hal penting yang perlu dimanage dengan baik dalam pemberdayaan SDA agar kekayaan alam yang ada mampu dipergunakan secara bijak sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan hingga generasi mendatang. Untuk itu sinergi maupun kerjasama perlu dibangun secara baik dan berkesinambungan agar pemberdayaan SDA sesuai dengan peruntukannya.

b) Pemberdayaan SDB.

Dilaksanakan oleh Kemhan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan SDB dalam hal ini berhubungan dengan sektor perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertambangan, perbankan, dan lain sebagainya yang perlu dirancang secara baik agar mampu memberikan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Pengelolaan potensi SDB tersebut harus tetap mengedepankan kemampuan SDM yang ada dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan tata kelola usaha. Kemhan bekerjasama dengan instansi terkait secara terpadu dan terkoordinasi mengelola SDB di daerah agar mampu mendukung pencapaian tujuan yang diharapkan. Disamping itu juga pengelolaan SDB juga sebagai bagian dalam membangun ketahanan nasional sehingga memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan suatu negara. Untuk itu penyiapan

SDA/SDB perlu dilakukan terintegrasi dengan penerapan sistem dukungan logistik berbasis kewilayahan disesuaikan dengan strategi dan gelar komponen pertahanan. Adapun pengelolaan baik SDA maupun SDB yang dilakukan pemerintah ataupun swasta harus memiliki kepastian hukum atau peraturan perundang-undangan terkait yang tetap menjunjung tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta mampu mendukung kemampuan pertahanan khususnya dalam pemberdayaan Wilhan di IKN.

4) Pemberdayaan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan tak lepas dari sarpras yang dapat menopang seluruh kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga kemajuan dan pertumbuhan kehidupan bangsa dapat dirasakan hingga di daerah. Hal ini penting untuk dapat diwujudkan agar terbangun pemerataan pada masing-masing wilayah Indonesia yang sangat kompleks. Dalam pelaksanaannya tersebut, maka dibutuhkan mekanisme kerja yang baik yang salah satunya diwujudkan melalui koordinasi dan kerjasama yang terbangun oleh pihak-pihak terkait. Adapun pemberdayaan sarpras tersebut dapat dilakukan melalui penyiapan terkait dengan transportasi, telekomunikasi, ketenaga kerjaan dan lain sebagainya yang dikelola secara terpadu, terarah, serta berkesinambungan.

Penyiapan sarpras tersebut harus dapat mengutamakan kemampuan SDM dengan memperhatikan standardisasi yang ada. Kemhan bersama pihak-pihak terkait berperan di dalam melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi terhadap penyiapan sarpras di daerah agar mampu mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Penyiapan sarpras bertujuan meningkatkan daya dukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dan membangun pemberdayaan wilayah pertahanan khususnya di IKN agar lebih optimal. Di samping itu

penyiapan sarpras harus mampu dipergunakan dalam rentan waktu tertentu sehingga memiliki nilai efektif dan efisien. Adapun yang juga perlu menjadi perhatian yaitu penyiapan sarpras diharapkan mampu menjadi akses bagi daerah-daerah yang selama ini masih tertinggal untuk dapat memajukan daerahnya sehingga pemerataan pembangunan dapat terwujud.

5) Pemberdayaan Nilai-Nilai.

Perihal pemberdayaan nilai-nilai memiliki sifat universal, nasional maupun nilai-nilai khas yang berada di TNI harus dilaksanakan supaya bangsa Indonesia tidak semakin tertinggal dalam tata pergaulan antar bangsa secara internasional. Melalui pemberdayaan nilai-nilai tersebut merupakan salah satu hal yang perlu dibangun secara baik karena merupakan pondasi dalam menghadapi perkembangan yang ada. Dengan bangunan nilai-nilai yang kuat akan menjadi proteksi tersendiri dalam meng-*counter* nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keindonesian.

Adapun nilai-nilai yang dimaksud seperti menjunjung tinggi HAM, kebebasan beragama, keadilan, persamaan gender dan lain sebagainya yang kesemuanya mengandung sikap untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara terutama pada konteks ini memperkuat upaya dalam pemberdayaan wilayah. Untuk itu pembinaan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan secara nasional harus dibina supaya bangsa Indonesia tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat.

Salah satu upaya yang dipandang perlu dilakukan yakni dengan melakukan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan yang konstruktif dengan menekankan pada peningkatan wawasan kebangsaan. Melalui pembinaan tersebut, diharapkan setiap warga negara memiliki pemahaman yang baik dalam membangun tatanan kehidupan bernegara sehingga terbangun kesepahaman dalam mewujudkan cita-cita nasional. Karena berkaca pada kondisi saat ini dimana masalah dalam bernegara

muncul salah satunya disebabkan karena lemahnya pemahaman atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara sehingga situasi ini perlu menjadi perhatian serius melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi warga negara dalam mewujudkan tujuan bersama dibawah kerangka pemberdayaan wilhan terutama di IKN.

6) Pemberdayaan Teknologi.

Pada konteks ini pemberdayaan teknologi merupakan salah satu upaya untuk mampu meningkatkan kemampuan bangsa dalam memproduksi materiil unggulan yang dapat mendukung kesejahteraan bangsa dan memperkuat kesiapan pemeberdayaan wilayah pertahanan. Dalam pemberdayaan teknologi ini dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesiapan hasil produksi bangsa sendiri yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa. Pemberdayaan teknologi tersebut ditempuh dengan pola *Transfer of Technology* (ToT) saat proses pengadaan barang dan jasa yang berasal dari negara luar, *development research* dengan menekankan pada pengembangan *prototype* suatu produk dan proses saat produk itu dibuat serta diujicobakan.

Adapun dalam pelaksanaannya pemberdayaan teknologi perlu dikelola dengan baik salah satunya dengan membangun *roadmap* agar terdapat acuan di dalam melaksanakan program yang akan dilaksanakan. Untuk itu pemberdayaan teknologi perlu didukung dengan kesiapan SDM serta berbagai kelengkapan lainnya agar benar-benar memberikan pengaruh baik bagi kemajuan bangsa. Dari sisi produksi, pemberdayaan teknologi menciptakan hasil produksi bangsa Indonesia yang dapat bersaing dengan produk negara lain sehingga mampu mendukung cita-cita nasional yakni menjadikan masyarakat sejahtera. Karenanya pemberdayaan teknologi perlu dipersiapkan secara matang mulai dari perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang yang

dituangkan dalam program-program sehingga jelas pencapaiannya. Penerapan sistem yang baik di dalam pemberdayaan teknologi merupakan hal mutlak yang perlu diimplementasikan agar pengelolaannya dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan yang di dalam pembangunan IKN berkelanjutan.

6) Pemberdayaan Dana.

Pada dasarnya pengelolaan pendanaan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian serius agar segala program atau kegiatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pemberdayaan keuangan tersebut perlu dikelola dengan secara transparan dan akuntabel sehingga semua pihak dapat mengetahui sistem pendanaan yang diterapkan sekaligus mencegah terjadinya penyelewengan atas dana tersebut. Pemberdayaan dana idealnya dapat dilakukan dengan melakukan analisis kebutuhan agar dapat diketahui hal-hal yang perlu dibiayai dalam program-program yang ada khususnya mengoptimalkan pemberdayaan Wilhan di IKN. Untuk itu sebaiknya pengelolaan dana diarahkan kepada pengelolaan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting system*) yang menjadikan kinerja sebagai fokus, sehingga seluruh potensi diarahkan untuk mendukung hasil yang diinginkan dapat tercapai.

7) Pelatihan Dasar Kemiliteran.

Pada dasarnya pelatihan dasar kemiliteran merupakan salah satu upaya di dalam pemberdayaan wilhan khususnya membangun IKN berkelanjutan. Melalui pelatihan tersebut, diharapkan setiap warga negara memiliki pemahaman yang baik dalam membangun kehidupan bernegara yang majemuk seperti Indonesia serta sebagai bagian mempersiapkan pertahanan sejak dini agar lebih mampu mengatasi masalah yang terjadi. Salah satu yang dapat dilakukan yakni dengan mempersipkannya Komcad pada tiap

komando kewilayahan dan/atau provinsi secara dini dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan komponen pertahanan negara.

Adapun Kemhan dan unsur-unsur terkait melakukan jalinan kerjasama sesuai dengan tupoksi yang diemban masing-masing pihak dalam upaya melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran. Dalam proses yang dilakukan diawali dengan perekrutan SDM/warga negara untuk dilatih dasar kemiliteran dilakukan melalui proses pendataan, pemilahan, pemanggilan/pemberitahuan, pendidikan dan pelatihan, pengangkatan disesuaikan dengan kebutuhan guna memperkuat sistem pertahanan yang bersifat semesta. Jika ditelaah lebih mendalam upaya pembinaan atau pelatihan dasar kemiliteran secara umum merupakan bagian di dalam menjalankan fungsi pemberdayaan Wilhan yang diemban TNI.

Oleh karenanya dalam pembinaan tersebut juga perlu memiliki ukuran yang jelas mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi agar dapat diketahui keberhasilan atau efektivitas dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya hal ini perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan agar pembangunan IKN dalam lingkup pemberdayaan Wilhan dapat dilakukan secara baik.

8) **Pembinaan Komponen Pendukung.**

Sebagaimana diketahui bahwa Komduk merupakan salah satu bagian dari sistem pertahanan negara yang juga memiliki peran strategis di dalam membangun dan memperkuat pertahanan negara. Komduk terdiri atas warga negara, SDA dan lain sebagainya, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan Komcad. Dalam pembinaan Komduk pada dasarnya mengacu ketentuan-ketentuan yang ada sehingga hal tersebut menjadi dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dijalankan. Jika mengacu pada

konsep pemberdayaan wilhan tentu pembinaan Komduk merupakan hal yang perlu didorong untuk dapat dilaksanakan secara optimal karena cakupan pemberdayaan wilhan memiliki lingkup yang luas yang tidak hanya terbatas pada TNI, Komcad namun juga Komduk (baca: Sishanta).

Untuk itu pembinaan Komduk perlu didesign secara baik dengan mempersiapkan segala aspek-aspek yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan output yang diharapkan. Pembinaan Komduk dalam kerangka pemberdayaan Wilhan khususnya untuk mendukung pembangunan IKN berkelanjutan merupakan hal yang perlu dikembangkan mengingat saat ini dinamika ancaman serta kondisi yang semakin kompleks menuntut adanya keterlibatan dari berbagai pihak dalam mewujudkan cita-cita bersama. Dengan terbentuknya sumber daya nasional yang mampu dimaksimalkan keberadaannya dipandang mampu dalam mewujudkan stabilitas sebagaimana yang diharapkan hingga akhirnya terbangun suatu tatanan kehidupan bernegara yang dapat mendorong tercapainya kesejahteraan bangsa.

Berdasarkan uraian diatas berkenaan pemberdayaan wilayah pertahanan pada umumnya memiliki makna yang multidimensional sehingga perlu dipahami dengan baik karena merupakan proses panjang (evolusi) yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Proses ini harus dimaknai secara baik agar pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan TNI dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN dapat benar-benar dilakukan secara optimal sehingga berbagai langkah-langkah ataupun program sesuai dengan visi dan misi IKN yakni menjadi Ibukota yang mampu menyatukan dan mensejahterahkan warga negaranya. Dalam prosesnya tersebut, maka rancangan yang baik yang tertuang pada perencanaan strategis yakni dengan mengedepankan proses berkelanjutan, penggunaan sumber daya, visi bersama, memilih dan berorientasi ke masa depan. Untuk itu keberadaan TNI melalui fungsinya pemberdayaan wilayah pertahanan perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar mampu mendukung pembangunan khususnya IKN yang saat ini sedang berjalan.

Disamping itu juga sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pemberdayaan wilayah pertahanan memiliki cakupan yang kompleks yang tidak hanya terkait dengan konteks perang, namun juga non perang. Untuk itu dalam hal ini TNI dituntut untuk dapat mengoptimalkan perannya tersebut agar pembangunan IKN sesuai dengan harapan. Karena sebagaimana dipahami pembangunan IKN merupakan hal yang bersifat kompleks sehingga memerlukan langkah-langkah terukur agar mampu dilaksanakan secara optimal dengan mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada sehingga tujuan dari pembangunan IKN dapat benar-benar tercapai



BAB IV PENUTUP

16. Simpulan

Pemberdayaan wilayah pertahanan pada hakikatnya merupakan sebuah prasyarat dalam mendukung terwujudnya stabilitas. Untuk itu pemberdayaan wilayah pertahanan perlu dirancang secara dini agar mampu seluruh komponen yang ada, sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Terutama pemberdayaan wilayah pertahanan guna keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Peran TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di IKN menjadi sangat penting karena jika dilihat dari sektor pertahanan dan keamanan, letak geografis IKN memiliki kelebihan dalam tindakan mobilisasi armada pertahanan dalam melakukan bantuan kepada wilayah daratan maupun kepulauan lain di Indonesia. Selain itu dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN diperlukan peningkatan sarana-prasarana pertahanan yang lebih baik, dengan identifikasi berbagai aspek seperti rintangan wilayah bagi musuh, relasi wilayah dan ketersediaan instalasi militer. Perwujudan pembangunan sarana-prasarana tersebut oleh pemerintah diharapkan akan mampu mencapai keamanan yang optimal pada wilayah IKN dan sekitarnya. Peran TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di IKN pada dasarnya mengacu regulasi aturan yang ada dimana intinya melibatkan seluruh komponen negara dalam memperkuat pertahanan negara dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas. Adapun pemberdayaan wilayah pertahanan terkait erat dengan mendukung pemerintah dalam rangka mempersiapkan segala potensi-potensi nasional untuk menjadi kekuatan pertahanan dan membantu serta mendukung pencapaian program pemerintah sehingga memiliki kekuatan pertahanan yang baik di dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada. Langkah strategis melalui pemberdayaan wilayah pertahanan merupakan upaya terukur

mempersiapkan ketahanan dari berbagai AGHT yang semakin kompleks.

- b. Babarapa kendala yang dihadapi TNI dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan seperti belum terbangunnya pemahaman personel secara kolektif perihal penerapan pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemahaman personel TNI atas pemberdayaan pemahaman merupakan hal yang perlu dibangun secara baik karena menyangkut tercapainya tujuan yang diharapkan. Kemudian persoalan lain yaitu belum terbangunnya peranti lunak yang mampu mendukung pemberdayaan wilhan, sinergi dan kerjasama yang belum padu serta lain sebagainya. Oleh karenanya gambaran pemberdayaan wilayah pertahanan yang saat ini dilaksanakan hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membangun upaya-upaya konstruktif kedepan.
- c. Dalam mengoptimalkan peran TNI khususnya berkenaan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan melalui berbagai upaya strategis, diantaranya: pemberdayaan SDM utamanya tiga matra TNI (AD, AL dan AU), mengoptimalkan SDA dan SDB yang ada agar mampu memberikan dampak positif terhadap untuk mendukung stabilitas di IKN, peningkatan sarana prasarana pendukung guna mendukung terwujudnya pembangunan IKN yang diharapkan serta berbagai langkah strategis lainnya.

17. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak agar pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh TNI dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN dapat terimplementasikan dengan baik sehingga mencapai tujuan. Beberapa rekomendasi diuraikan sebagai berikut:

a. Menteri Pertahanan.

- 1) Melakukan penyempurnaan instrumen pertahanan dan keamanan yang terdapat di IKN dengan fokus pada peningkatan infrastruktur

pengamanan serta alutsista dan penambahan personil. Hal ini perlu dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi letak geografis IKN yang terletak di pulau yang menjadi teritori negara lain. Selain itu perlu juga untuk membangun sistem pertahanan terpadu dan terintegrasi dimana tiga matra yang ada mampu terbangun dengan optimal khususnya terkait di dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

- 2) Mengorganisir sinergi dan kerjasama khususnya antara Kemhan, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta unsur terkait lainnya di dalam mengoptimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan agar mampu dijalankan secara optimal.

3) Bersama Panglima TNI.

- a) Meningkatkan gelar kekuatan TNI atas tiga matra secara optimal. Langkah strategis ini sebagai bentuk membangun dan memperkuat sistem pertahanan khususnya di dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.
- b) Menutup Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dikarenakan Alur tersebut berpotensi menjadi ancaman keamanan di IKN serta mengalihkannya dengan memperkuat dan pengembangan wilayah ALKI III.

b. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

- 1) Menyelenggarakan Bhakti TNI melalui pembinaan seluruh matra sehingga mampu mendukung dan menyiapkan penataan ruang kawasan pertahanan.
- 2) Melaksanakan *monitoring* atau pengawasan terhadap program-program yang dijalankan dalam mendukung terwujudnya pertahanan yang kuat sesuai dengan tupoksi khususnya dalam pengembangan IKN berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiman, Arief. 1995. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.
- Lemhanas RI. 2022. Bidang Studi Sistem Manajemen Nasional. Jakarta: Lemhanas RI.
- Nursini. 2010. Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah Teori Dan Aplikasi, diakses <https://core.ac.uk/download/pdf/77629914.pdf>
- Soejono Soekanto. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Spenser, Herbert. 1899. *The Principles of Sociology*. New York: Appleton & Company.

Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah RI, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.
- Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN.
- Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Pemerintah RI, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Renstra tahun 2020-2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
- Keputusan Panglima TNI No. Kep/1/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pokok-pokok Kebijakan Panglima TNI tahun 2020.

Jurnal/Artikel

- Departement of The Army United States of America. *Joint Doctrine for Military Operations Other Than War*, Joint Pub 3-07, June 1995.
- Fisher, R.E. et. al, *Constructing a Resilience Index for the Enhanced Critical Infrastructure Protection Program*, Argonne national Laboratory, AN/DIS-10-9, Agustus 2010.

Website/Internet

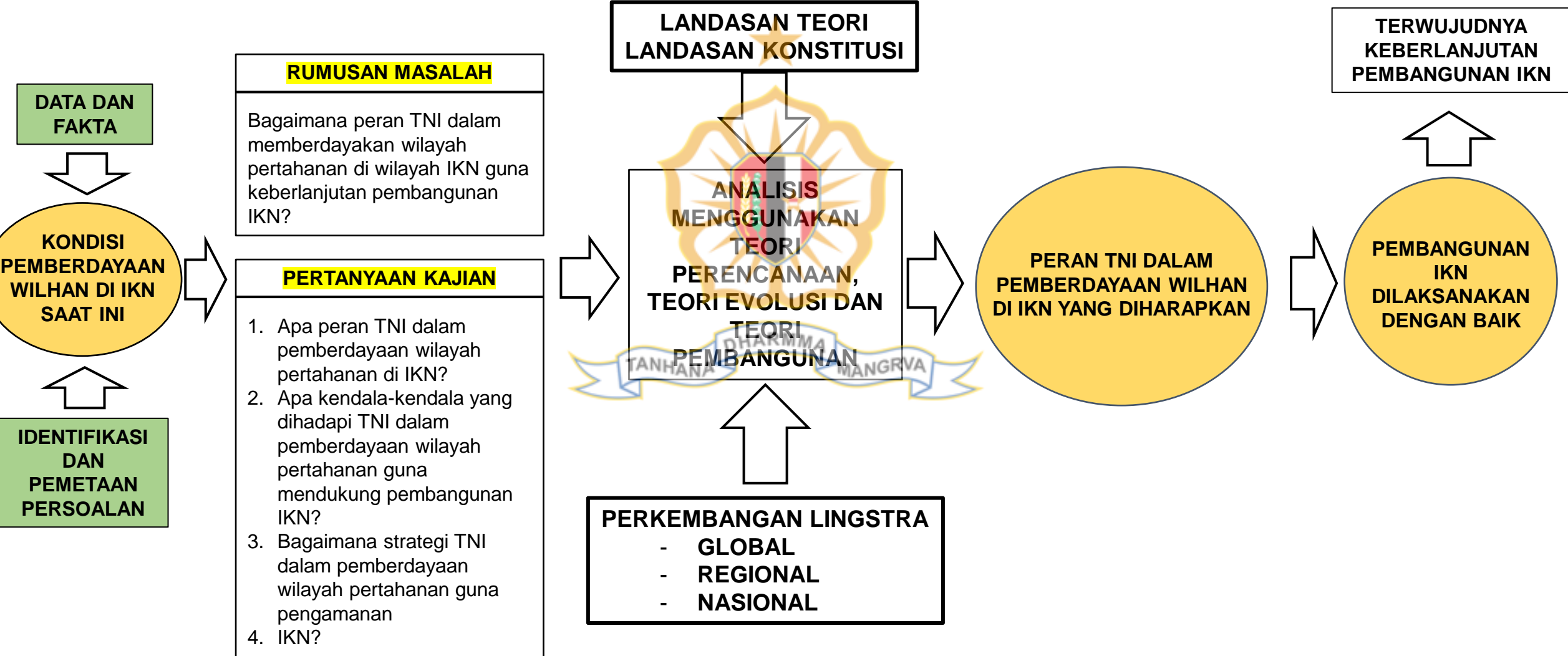
- Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/penduduk-indonesia-masih-terkonsentrasi-di-pulau-jawa> diakses pada 30 Mei 2022 pukul 12.30 WIB.
- <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/610b9dc3601f5/pertumbuhan-ekonomi-papua-maluku-tertinggi-capai-8-75-pada-kuartal-2>, diakses 1 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.
- <https://katadata.co.id/sortatobing/berita/610ce05b8eba8/daftar-kekuatan-militer-ri-yang-berada-di-peringkat-16-dunia>, diakses 3 Juli 2022 pukul 19.21 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220217132535-20-760439/andika-ungkap-4500-hektare-lahan-di-ikn-untuk-tni-bangun-kodam>, diakses 1 September 2022 pukul 19.21 WIB.

Lain-lain

- Bappenas. 2021. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara.
- MABES TNI. 2022. Kajian Pemindahan Mabes TNI ke IKN.
- RPJP Kementerian PPN/Bappenas. Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) tahun 2005-2025.
- MABES TNI. 2022. Kajian Pemindahan Ibu Kota Negara Dari Aspek Pertahanan Dan Keamanan.

ALUR PIKIR

PERAN TNI DALAM PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN GUNA KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN)



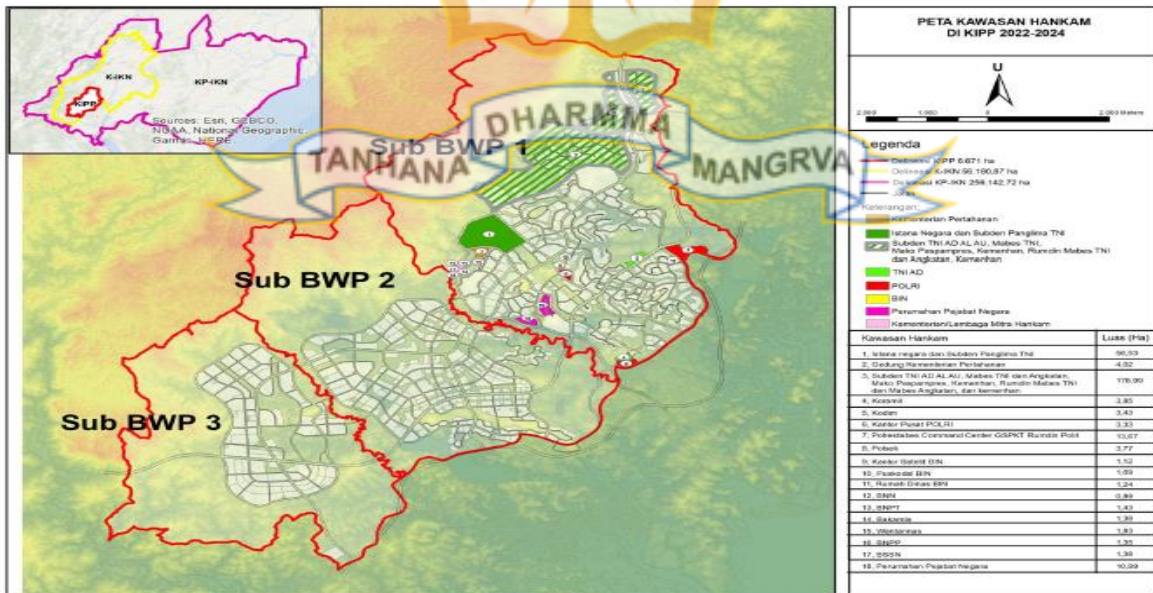
LAMPIRAN : KELENGKAPAN DATA

Gambar 1: 8 Prinsip dan 24 KPI IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua

1. Selaras Dengan Alam	2. Bhinneka Tunggal Ika	3. Terhubung, Aktif dan Mudah Diakses	4. Rendah Emisi Karbon	5. Sirkuler dan Tangguh	6. Aman dan Terjangkau	7. Nyaman dan Efisien melalui Teknologi	8. Peluang Ekonomi untuk Semua
1.1 >75% dari 256.142 Ha area untuk ruang hijau (65% area dilindungi dan 10% area produksi makanan)	2.1 100% integrasi seluruh penduduk	3.1 80% perjalanan dengan transportasi publik atau mobilitas aktif	4.1 Instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi Ibu Kota Nusantara	5.1 >10% dari lahan 256.142 Ha tersedia untuk kebutuhan produksi pangan	6.1 Ranking 10 besar kota paling layak huni di dunia pada tahun 2045	7.1 Mewujudkan peringkat sangat tinggi dalam E-Government Development Index (EGDI) oleh PBB	8.1 0% kemiskinan pada populasi Ibu Kota Nusantara pada tahun 2035
1.2 100% penduduk dapat mengakses ruang hijau rekreasi dalam 10 menit	2.2 100% warga dapat mengakses layanan sosial/masyarakat dalam waktu 10 menit	3.2 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi publik	4.2 60% penghematan energi untuk konservasi energi dalam gedung	5.2 60% daur ulang timbulan limbah padat di tahun 2045	6.2 Pemukiman yang ada dan terencana di kawasan 256.142 Ha memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045	7.2 100% konektivitas digital dan teknologi, informasi, serta komunikasi untuk semua penduduk dan bisnis	8.2 Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi
1.3 100% penggantian ruang hijau untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian	2.3 100% ruang publik dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, serta desain yang responsif gender dan inklusif	3.3 <50 menit Koneksi transit ekspres dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ke bandara strategis pada tahun 2030	4.3 Net zero emission untuk Ibu Kota Nusantara di 2045 di kawasan 256.142 Ha	5.3 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun 2035	6.3 Perumahan layak, aman, dan terjangkau yang memenuhi rasio hunian berimbang.	7.3 >75% kepuasan dunia usaha atas layanan digital	8.3 Rasio Gini regional terendah di Indonesia di 2045

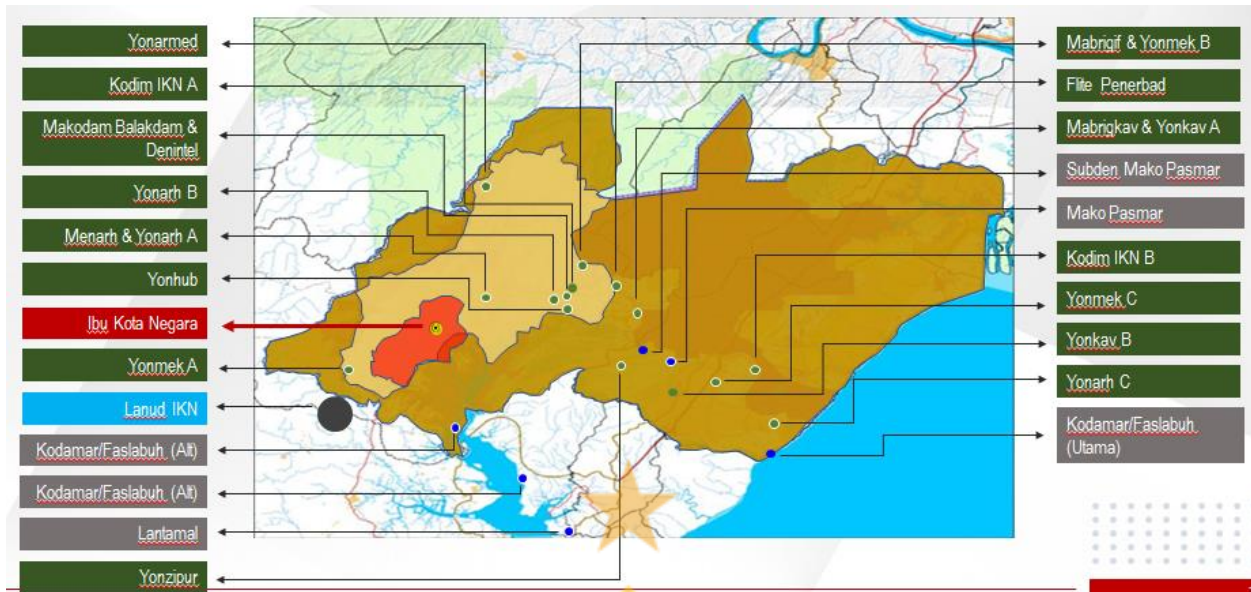
Sumber: Lampiran II UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Gambar 2: Peta Hankam di KIPP 2022-2024



Sumber: Bappenas (2022)

Gambar 3: Konsep Gelar Satuan TNI di IKN



Sumber: Seminar Paparan MABES TNI oleh Laksda TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M.

(2022)

Gambar 4: Kriteria Pemilihan dan Terpilihnya Kalimantan Timur



Sumber: Bappenas (2021)

Gambar 5: Visi IKN



RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV

A. Data Pokok

1. Nama : Murbianto Adhi Wibowo, S. Sos
2. Pangkat/NRP : Kolonel Inf /11950047081273
3. TTL : Bekasi, 13 Desember 1973
4. Jabatan : Pamen Denma Mabasdad
5. Instansi : TNI AD
6. Agama : Islam
7. Alamat Email : murbi95@gmail.com



B. Pendidikan Umum

1. SDN Mangkura di Makassar 1988
2. SMPN 6 di Makassar 1985
3. SMAN 1 di Salatiga 1991
4. S1/UNIV Merdeka di Malang 2013

C. Pendidikan Militer/Kursus/Khusus

1. AKMIL 1995
2. SUSLAPA 2004
3. SESKO ANGKATAN/SESKO LN (ACSC) 2010
4. SESKO TNI (DIKREG XLVI) 2019

D. Pengalaman Jabatan

1. Danton hingga Dantim/ Pa Staf di Kopassus 1997 s.d. 2004
2. Wadanyon/Pasiopsrem di Dam I/BB 2004 s.d. 2007
3. Pabanda Latmagab Sopsad 2007 s.d. 2009
4. Pabandyalat Sopsdam V/Brw 2011 s.d. 2012

5. Danyonif 512/QY Dam V/Brw	2012 s.d. 2013
6. Dandim 0623/CLG Dam III/Slw	2012 s.d. 2014
7. Waasops Danjen Kopassus	2014
8. Wadansat-81 Kopassus	2014 s.d. 2016
9. Aslog Danjen Kopassus	2016 s.d. 2017
10. Dansat-81 Kopassus	2017
11. Pamen Kopassus (Tugas LN Dansatgas FHQSU Lebanon)	2017 s.d. 2018
12. Pamen Ahli Gol. IV Kopassus (Gultor)	2018 s.d. 2019
13. Pamen Denma Mabasad (Dikreg Sesko TNI)	2019 s.d. 2020
14. Asops Kasdam XVII/Cen	2020 s.d. 2021
15. Kadep Mildas Akmil	2021 s.d. 2022
16. Pamen Denma Mabasad (PPRA LXIV)	2022

E. Data Keluarga

1. Nama Istri : Ny. Riasatika
2. Nama Anak :
 - a. Kautsar Ryandika Wibowo (Laki, 21 Th)
 - b. Dhiimika Syaiful Wibowo (Laki, 19 Th)
 - c. Althaf Naradipa Triwibowo (Laki, 13 Th)



Jakarta, Oktober 2022

Peserta

Murbianto Adhi Wibowo
Kolonel Inf NRP 11950047081273